



**ANALISIS PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN  
DI JEMBER**

**SKRIPSI**

Oleh  
**Ilham Kistanto**  
**NIM 090810101120**

**ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2013**



# **ANALISIS PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DI JEMBER**

## **SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)  
dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh  
**Ilham Kistanto**  
**NIM 090810101120**

**ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2013**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur yang tak terhingga pada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Nursutima dan Almarhum Ayahanda M. Kusno tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

## **MOTTO**

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi  
(pula) kamu sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui,  
sedang kamu tidak mengetahui.

(QS. Al Baqarah 2:216)

Imam Ali a.s berkata, "Kelemah-lembutan itu kunci kesuksesan."

(Ghurar al Hikam)

Semua orang bisa bermimpi, tapi hanya sebagian orang  
yang bisa meraih mimpi.

(Mario Teguh)

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Ilham Kistanto

NIM : 090810101120

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:”Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten Di Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 juli 2013

Yang menyatakan,

Ilham Kistanto  
NIM 090810101120

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN  
DI JEMBER**

Oleh  
Ilham Kistanto  
NIM 090810101120

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dra. Nanik Istiyani, M.Si  
Dosen Pembimbing II : Fivien Muslihatinningsih, SE, M.Si

## **TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten Di Jember  
Nama Mahasiswa : Ilham Kistanto  
NIM : 090810101120  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia  
Tanggal Persetujuan : 10 juli 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Nanik Istiyani, M.Si  
NIP. 19610622 198702 2 002

Fivien Muslihatinningsih, SE, M.Si  
NIP. 19830116 200812 2 001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Dr. I Wayan Subagiarta, SE., M.Si  
NIP. 19600412 198702 1 001

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi**

**ANALISIS PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN  
DI JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ilham Kistanto

NIM : 090810101120

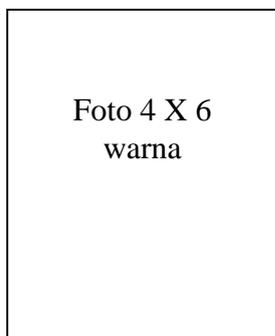
Jurusan: Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. I Wayan Subagiarta, SE., M.Si (.....)  
NIP. 19600412 198702 1 001
2. Sekretaris : Drs. P. Edi Suswandi, MP (.....)  
NIP. 19550425 198503 1 001
3. Anggota : Fivien Muslihatinningsih, SE, M.Si (.....)  
NIP. 19830116 200812 2 001



Mengetahui/Menyetujui,  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi Dekan,

Dr. M. Fathorrazi, SE., M.Si  
NIP. 19630614 1 199002 1 001

## *Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten Di Jember*

**Ilham Kistanto**

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,  
Universitas Jember*

### **ABSTRAK**

Penetapan upah minimum kabupaten Jember dalam beberapa tahun terakhir cenderung kondusif, melainkan upah minimum kabupaten Jember masih tergolong rendah dibandingkan beberapa kabupaten lainnya di daerah Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebutuhan hidup layak (KHL), produk domestik regional bruto (PDRB), inflasi terhadap upah minimum kabupaten Jember. Penelitian ini fokus pada analisis *explanatory*, yaitu menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Estimasi OLS menunjukkan bahwa variabel independen dapat berpengaruh terhadap variabel dependen pada jangka waktu tertentu. Regresi linier berganda digunakan karena penelitian ini mencakup lebih dari dua variabel, dimana dalam regresi linier berganda variabel dependen dipengaruhi pada dua atau lebih variabel independen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten Jember pada tahun berikutnya akan terus meningkat seiring tingginya harga kebutuhan pokok sebagai pelindung upah minimal bagi para buruh.

Kata Kunci: upah minimum kabupaten, KHL, PDRB, inflasi, analisis regresi linier berganda.

## *The Analysis of Regency Minimum Wage Decision In Jember*

*Ilham Kistanto*

*Development Economics Department, Faculty of Economics, University of Jember*

### **ABSTRACT**

*Jember regency minimum wage in recent years tended conducive, but the minimum wage is still low Jember district than some other districts in East Java. The purpose of this study was to determine the effect of decent living (KHL), gross regional domestic product (GDP), inflation of the minimum wage Jember district. This study focuses on analyzing explanatory, that is using Ordinary Least Square (OLS). OLS estimates indicate that the independent variable can affect the dependent variable in a certain time period. Multiple linear regression was used because it involves more than two variables, multiple linear regression where the dependent variable is affected in two or more independent variables. It can be concluded that the results of this study indicate that the minimum wage in Jember district will continue to rise next year as the high price of basic commodities as a protection for the minimum wage workers.*

*Keywords: minimum wage counties, KHL, GDP, inflation, multiple linear regression analysis.*

## RINGKASAN

**Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten Di Jember;** Ilham Kistanto; 090810101120; 2013; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penetapan upah minimum kabupaten merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap para buruh yang ada di seluruh Indonesia. Mengingat dibawah tahun 1970an para buruh diberikan upah yang sangat rendah dan kondisi lingkungan pekerjaan yang berada dibawah standar. Adanya kejadian seperti ini sebuah organisasi perdagangan Amerika Serikat dan beberapa aktivis hak asasi manusia mengajukan keberatan terhadap sebuah perusahaan-perusahaan multinasional yang bergerak di daerah Indonesia. Kebijakan upah minimum di Indonesia sendiri pertama kali diterapkan pada awal tahun 1970an. Namun pelaksanaannya tidak efektif pada tahun-tahun tersebut. Pemerintah Indonesia baru mulai memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan kebijakan upah minimum pada akhir tahun 1980an.

Berdasarkan data yang dilansir Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jember, UMK Jember 2012 sebesar Rp920.000 atau hanya naik 5,14% saja dari UMK 2011 sebesar Rp875.000. Kepala Disnakertrans Jember Mohammad Hariyadi (2012) menilai, kenaikan UMK itu cukup tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya seperti Bondowoso, Banyuwangi, dan Situbondo. Pada tahun tersebut belum ada penangguhan dari para pengusaha yang berada di Jember, dengan ini maka semua perusahaan setuju dengan kenaikan upah minimum kabupaten Jember yang naik 5,14% dari UMK sebelumnya. Tapi seandainya ada pengusaha mengajukan penangguhan pemberlakuan UMK 2012, nantinya para pegawai Dinas akan turun ke lapangan untuk melihat dari dekat kondisi sebenarnya dari perusahaan itu. Jika menurut pengamatan perusahaan penolak kenyataannya mampu, maka akan dikenai sanksi. Sebaliknya jika pailit, Disnakertrans akan mempertemukan antara perusahaan dan pekerja untuk saling memahami.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah KHL, PDRB dan inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan UMK Jember. Gambaran adanya pengaruh atau tidak ini diukur dengan menggunakan analisis *explanatory* yang merupakan *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil estimasi analisis regresi linier berganda pada uji secara bersama-sama semua variabel independen berpengaruh terhadap UMK Jember. Berdasarkan hasil uji parsial bahwa variabel KHL dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap UMK Jember, sedangkan variabel inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap penetapan UMK Jember.

Hal ini bisa dilihat dari data variabel KHL tiap tahunnya yang mendekati nilai data upah minimum Kabupaten Jember, namun pertumbuhan nilai kebutuhan hidup layak tidak pernah melebihi nilai pertumbuhan upah minimum Kabupaten Jember. Dapat disimpulkan bahwasannya pemerintah Kab. Jember belum bisa menuntaskan masalah atau keinginan buruh sampai sekarang, yaitu dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan tingkat penghasilan yang harus dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup layak. Jadi jika dalam peraturan pemerintah upah minimum sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak dalam penetapan upah minimum, namun secara kualitas tidak mengalami perubahan dan hal itu sama sekali tidak membawa perubahan terhadap peningkatan atau perbaikan kesejahteraan kaum buruh di berbagai daerah khususnya di Jember.

Hasil estimasi menunjukkan variabel PDRB berpengaruh terhadap UMK Jember. Hal ini menunjukkan produktivitas tenaga kerja buruh di daerah Jember termasuk cukup baik atau ada peningkatan tiap tahunnya. Para pengusaha tidak begitu khawatir dengan adanya kenaikan upah minimum kabupaten, karena dengan adanya kelebihan keuntungan dari hasil produksi yang meningkat maka para pengusaha akan sanggup membayar tanggungan upah buruh atau upah minimum Kabupaten Jember. Hal ini harus tetap bisa dipertahankan tiap tahunnya, agar terciptanya kesejahteraan buruh dan terjadinya hubungan yang harmonis antara pengusaha, buruh dan pemerintah.

## **PRAKATA**

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten Di Jember”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, tenaga, pikiran, materi, dan saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Nanik Istiyani, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing penulis dan dukungan untuk menyusun tugas akhir yang baik dan tulus ikhlas;
2. Ibu Fivien Muslihatinningsih, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr. M. Fathorrazi, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Bapak Dr. I Wayan Subagiarta, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember;
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Jember serta Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Perpustakaan Pusat;
6. Ibunda Nursutima dan Almarhum Ayahanda M. Kusno , terimakasih yang tak terhingga ananda ucapkan atas doa, dukungan, kasih sayang, motivasi, kerja keras, kesabaran dan pengorbanan selama ini;

7. Adikku Siti Halimatus Sakdiah dan Siti Hamzah Aprilia beserta seluruh keluarga besarku, terimakasih atas doa dan kasih sayang, serta dukungan yang tanpa henti;
8. Sahabat-sahabatku tersayang, Henry, Zaenal, fafa, indra, ririk, oni, rico, eko, fahmi, denok, firoh, dess, betha, maria, titi, widya, uly, iva terima kasih untuk semua cerita dan kenangan bersama, baik canda tawa maupun keluh kesah.
9. Teman-teman konsentrasi SDM, regional dan moneter yang memberikan pengalaman dan pengetahuan dalam bersosialisasi dan berorganisasi;
10. Seluruh teman-teman di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih semuanya.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna didunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya. Amien.

Jember, 27 Agustus 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>4</b>
<b>1.4 Manfaat penelitian</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>5</b>
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	<b>5</b>
2.1.1 Teori Upah .....	<b>5</b>
2.1.2 Upah Minimum .....	<b>6</b>
2.1.3 Ketentuan dan Penetapan Upah Minimum .....	<b>7</b>
2.1.4 Prinsip2 dalam Penetapan Keb. Upah Minimum.....	<b>8</b>
2.1.5 Pengaruh KHL Terhadap UMK.....	<b>9</b>

2.1.6 Pengaruh PDRB terhadap UMK.....	11
2.1.7 Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap UMK.....	13
<b>2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya.....</b>	<b>15</b>
<b>2.3 Kerangka Konseptual.....</b>	<b>18</b>
<b>2.4 Hipotesis.....</b>	<b>20</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>21</b>
<b>3.1 Rancangan Penelitian.....</b>	<b>21</b>
3.1.1 Jenis Penelitian.....	21
3.1.2 Unit Analisis.....	21
3.1.3 Jenis dan sumber data.....	21
<b>3.2 Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>21</b>
<b>3.3 Metode Analisis Data.....</b>	<b>22</b>
3.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda.....	22
3.3.2 Uji Statistik.....	23
3.3.3 Uji Asumsi Klasik.....	25
<b>3.4 Definisi Variabel Operasional dan Pengukurannya.....</b>	<b>28</b>
<b>BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
<b>4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian.....</b>	<b>30</b>
<b>4.2 Gambaran Umum Variabel Penelitian.....</b>	<b>31</b>
4.2.1 Upah Minimum Kabupaten.....	31
4.2.2 Kebutuhan Hidup Layak (KHL).....	34
4.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	36
4.2.4 Inflasi.....	37
<b>4.3 Analisis Data.....</b>	<b>39</b>
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	39
4.3.2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	41
4.3.3 Hasil Uji Statistik.....	42
4.3.4 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	43
<b>4.4 Pembahasan.....</b>	<b>45</b>

<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>49</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>49</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>50</b>
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>55</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Uraian</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Konsep Penelitian Sebelumnya .....	17
4.1	Data dan Perkembangan UMK Jember (1990-2011) .....	33
4.2	Data dan Perkembangan KHL di Jember (1990-2011) .....	35
4.3	Data dan Perkembangan PDRB di Jember (1990-2011).....	36
4.5	Data Inflasi di Jember (1990-2011).....	38
4.6	Statistik Data .....	39
4.7	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .....	41
4.8	Hasil Uji Deteksi Klein .....	43
4.9	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	44
4.10	Hasil Uji Autokorelasi .....	44
4.11	Hasil Uji Ramsey Reset test .....	45
4.12	Hasil Uji Normalitas .....	45

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Uraian</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Kerangka Konseptual .....	19

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Uraian</b>	<b>Halaman</b>
A	Data Mentah Upah Minimum Kabupaten, Kebutuhan Hidup Layak, PDRB dan Inflasi Tahun (1990-2011) di Kab. Jember.....	55
B	Hasil Analisis Deskriptif .....	56
C	Hasil Regresi Linier Berganda .....	57
D	Hasil Uji Multikolinieritas .....	58
E	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	60
F	Hasil Uji Autokorelasi.....	61
G	Hasil Uji Linieritas .....	62
H	Hasil Uji Normalitas .....	63

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang akan diuraikan pada bab I ini berisi tentang latar belakang terkait dengan objek penelitian yang di teliti dan permasalahan yang ada pada objek tersebut atau rumusan masalah berkaitan dengan variabel-variabel yang di ambil dan menyertakan tujuan dan manfaat penelitian dalam bab pendahuluan.

### **1.1 Latar Belakang**

Pemasalahan dasar yang berkaitan dengan upah sama di setiap negara, akan tetapi cara penanggulangannya dan peraturannya berbeda antar negara. Pekerja atau buruh, pengusaha, pemerintah dan masyarakat pada umumnya mempunyai kepentingan yang sama atas sistem dan kebijakan pengupahan. Pekerja atau buruh dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu para pekerja dan serikat pekerja atau serikat buruh selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya (Sinaga, 2008:30). Kebijakan Upah Minimum telah menjadi hal yang penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara baik maju maupun berkembang. Sasaran dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Dengan demikian, kebijakan upah minimum adalah untuk (a) menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, (b) meningkatkan produktivitas pekerja, (c) mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien (Sumarsono, 2003).

Kebijakan upah minimum di Indonesia sendiri pertama kali diterapkan pada awal tahun 1970an. Meskipun demikian, pelaksanaannya tidak efektif pada tahun-tahun tersebut (Suryahadi dkk, 2003:29-50). Pemerintah Indonesia baru mulai memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan kebijakan upah minimum pada akhir tahun 1980an. Hal ini terutama disebabkan adanya tekanan dari dunia

internasional sehubungan dengan isu-isu tentang pelanggaran standar ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia. Di masa tersebut, sebuah organisasi perdagangan Amerika Serikat (AFL-CIO) dan beberapa aktivis hak asasi manusia mengajukan keberatan terhadap sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat beroperasi di Indonesia yang diduga memberikan upah yang sangat rendah dan kondisi lingkungan pekerjaan yang berada dibawah standar (Gall, 1998 dan Suryahadi dkk 2003). Pada hakekatnya konstruksi hukum dalam ketentuan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen dan selanjutnya disingkat UUD 1945) memberi suatu deskriptif bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Prinsip hukum ini, selanjutnya dijabarkan dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa “Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Kepala Disnakertrans Jember Mohammad Hariyadi (2012) menilai, kenaikan UMK itu cukup tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya seperti Bondowoso, Banyuwangi, dan Situbondo. Berdasarkan data yang dilansir Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jember, UMK Jember 2012 sebesar Rp920.000 atau hanya naik 5,14% saja dari UMK 2011 sebesar Rp875.000. Apabila lewat dari batas waktu penangguhan tidak ada pengusaha mengajukan penolakan maka dianggap semua pengusaha di Jember menyetujui peraturan Gubernur tersebut. Sampai saat ini, dari sekitar 600 perusahaan, belum ada yang mengajukan permohonan keberatan kepada Disnakertrans Jember. Tapi seandainya ada pengusaha mengajukan penangguhan pemberlakuan UMK 2012, nantinya dinas akan turun ke lapangan untuk melihat dari dekat kondisi sebenarnya dari perusahaan itu. Jika hingga batas penangguhan terlewati maka dapat disimpulkan tidak ada keberatan ataupun penolakan dari pengusaha. Disnakertrans juga sudah punya peta mengenai perusahaan di Jember (Kepala Disnakertrans Jember, 2012).

Jika menurut pengamatan perusahaan penolak kenyataannya mampu, maka akan dikenai sanksi. Sebaliknya jika pailit, Disnakertrans akan mempertemukan

antara perusahaan dan pekerja untuk saling memahami. Dengan ini Disnakertrans memberikan penggolongan antara perusahaan yang mampu menjalankan peraturan sepenuhnya dengan perusahaan yang tidak menjalankan peraturan sepenuhnya, dengan dikategorikan atau digolongkan sebagai warna hijau, kuning dan merah. Hijau artinya perusahaan itu sehat dan sudah menjalankan aturan ketenagakerjaan dan hanya sekali tempo perlu mendapat pembinaan. Sementara kuning artinya aturan ketenagakerjaan 5- 10% nya tidak ditaati, dan merah lebih parah lagi yakni melakukan penyimpangan peraturan ketenagakerjaan atau hanya 30-40% saja aturan dijalankan.

Pembina Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Eks Karesidenan Besuki Iswinarso dalam jurnal Musriha (2010) mengatakan Pengusaha, pemerintah daerah, dan buruh perlu melakukan pertemuan hingga 12 kali untuk menentukan. Namun akhirnya terjadi kesepakatan. Pengusaha sendiri hanya mengharapkan adanya peningkatan kinerja dan produktivitas tenaga kerja. Dan juga ada dugaan tren rendahnya inflasi di Jember membuat penentuan UMK di Jember relatif tanpa pergolakan. Unsur inflasi masuk dalam perhitungan UMK. Tidak ada alasan lagi pengusaha tak memenuhi UMK. Dengan tingkat inflasi sangat rendah di Jember dibandingkan daerah lain di Jatim, dan tingkat konsumsi yang tinggi, perekonomian sangat stabil di Jember. Tahun 2010 inflasi Jember sekitar 4,3 persen plus minus satu persen. Namun, Deputi Bidang Moneter Bank Indonesia Jember, Dwi Suslamanto dalam jurnal Musriha (2010) beranggapan stabilitas inflasi di Jember bukan faktor utama tidak bergolaknya penentuan UMK di Jember. Penentuan UMK tak terlampaui besar karena Jember bukan kota industri besar. Jumlah buruh relatif kecil dan indikator paling sederhana sebagian besar mereka yang naik haji dibiayai sektor pertanian. Indikasi basis pertanian kuat dan pertanian tidak memikirkan upah, yang penting pemerintah menjamin produksi lancar.

Berdasarkan uraian di atas, mengingat pentingnya upah minimum kabupaten bagi para pekerja buruh sebagai pelindung upah minimal yang diberikan para pengusaha untuk para buruh. Maka penulis ingin menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan upah minimum kabupaten yaitu

dengan variabel-variabel bebasnya kebutuhan hidup layak, produk domestik regional bruto dan tingkat inflasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini:

1. Seberapa besar pengaruh kebutuhan hidup layak, produk domestik regional bruto dan tingkat inflasi terhadap penentuan upah minimum kabupaten Jember secara bersama-sama.
2. Seberapa besar pengaruh kebutuhan hidup layak, produk domestik regional bruto dan tingkat inflasi terhadap penentuan upah minimum kabupaten Jember secara parsial.

## **1.3 Tujuan**

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kebutuhan hidup layak, produk domestik regional bruto dan tingkat inflasi terhadap penentuan upah minimum kabupaten Jember secara bersama-sama.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kebutuhan hidup layak terhadap penentuan upah minimum kabupaten Jember secara parsial
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh produk domestik regional bruto terhadap penentuan upah minimum kabupaten Jember secara parsial.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat inflasi terhadap penentuan upah minimum kabupaten Jember secara parsial.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi pembaca, dapat dipergunakan sebagai pemikiran atau bahan informasi dalam melakukan penelitian tentang upah minimum.
2. Bagi Akademik, sebagai informasi dan bahan kajian untuk perbandingan bagi peneliti lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka yang akan diuraikan pada bab II ini diharapkan dapat memberi justifikasi pada teori-teori yang sudah ada, sehingga akan menghasilkan hipotesa-hipotesa penelitian yang membentuk kerangka pemikiran teoritis. Berikut ini akan diuraikan secara sistematis tinjauan pustaka yang mengembangkan hipotesis dari variabel yang diteliti.

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1. Teori Upah**

Menurut teori ekonomi, upah dapat diartikan sebagai pembayaran yang diberikan kepada tenaga kerja buruh atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh para pengusaha dan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa atau syarat-syarat tertentu (Sadono Sukirno, 2005).

Sumarsono (2003) mengemukakan perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi. Konsumen akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau *scale effect*.
2. Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lainnya.

Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja (*substitution effect*).

Definisi upah pada UU No 13 tahun 2003 pada pasal 1 ayat 30 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

#### 2.1.2. Upah Minimum

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya (UU No. 13 Tahun 2003). Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi. Upah Minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/1981 upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral, meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah.

Berdasarkan Undang Undang No 13 tahun 2003 disebutkan bahwa upah minimum hanya ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun. Definisi tersebut terdapat dua unsur penting dari upah minimum (Sumarsono, 2003) yaitu adalah:

1. Upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh buruh pada waktu pertama kali dia diterima bekerja.
2. Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah tangga.

Upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan "*living wage*", yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah minimum dapat mencegah pekerja dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang *low skilled*. Upah minimum dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konverisional (Kusnaini, 1998).

#### 2.1.3. Ketentuan dan Penetapan Upah Minimum

Simanjuntak (2002) dalam tulisannya yang berjudul "*Masalah Upah dan Jaminan Sosial*" menyatakan bahwa pemerintah setiap tahun atau sekali dalam dua tahun menetapkan upah minimum untuk setiap provinsi atau untuk beberapa daerah kabupaten yang berdekatan. Tujuan penetapan upah minimum adalah untuk:

1. Menghindari atau mengurangi persaingan yang tidak sehat sesama pekerja dalam kondisi pasar yang surplus, yang mendorong mereka menerima upah di bawah tingkat kelayakan;
2. Menghindari atau mengurangi kemungkinan eksploitasi pekerja oleh pengusaha yang memanfaatkan kondisi pasar kerja untuk akumulasi keuntungannya;
3. Sebagai jaring pengaman untuk tingkat upah karena satu dan lain hal jangan turun lagi;
4. Mengurangi tingkat kemiskinan absolute pekerja, terutama bila upah minimum tersebut di kaitkan dengan kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya;

5. Mendorong peningkatan produktivitas baik melalui perbaikan gizi dan kesehatan pekerja maupun melalui upaya manajemen untuk memperoleh kompensasi atas peningkatan upah minimum;
6. Meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum;
7. Menciptakan hubungan industrial yang lebih aman dan harmonis.

Penetapan besaran UMK berdasarkan undang-undang republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ditentukan oleh dewan pengupahan yang anggotanya terdiri dari pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pakar praktisi. Pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Nasional yang merupakan lembaga independen terdiri dari pakar praktisi dan lain sebagainya yang bertugas memberikan masukan kepada pemerintah, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) sebagai penyalur aspirasi pekerja dan wakil pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Semua pihak yang berwenang bertugas mengevaluasi tingkat upah minimum yang berlaku pada saat tertentu dan memutuskan apakah tingkat upah tersebut sudah saatnya dinaikkan atau belum (Tjiptoherijanto, 2000).

#### 2.1.4. Prinsip-Prinsip Dalam Penetapan Kebijakan Upah Minimum di Indonesia

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1999 menyatakan bahwa ada sepuluh prinsip-prinsip yang harus ditaati dalam penetapan kebijakan upah minimum di Indonesia.

1. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.
2. Upah minimum wajib dibayar kepada pekerja secara bulanan atau dengan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha misalnya untuk upah mingguan atau upah dua mingguan.
3. Besarnya upah pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap, atau dalam masa percobaan adalah serendah-rendahnya sebesar upah minimum.
4. Upah minimum hanya berlaku untuk pekerja yang bekerja dibawah satu tahun.

5. Peninjauan upah dilakukan atas kesepakatan antara pekerja/serikat pekerja dan pengusaha.
6. Pekerja dengan sistem borongan atau dengan satuan hasil serendah rendahnya adalah sebesar upah minimum untuk upah bulanannya.
7. Upah pekerja harian lepas ditetapkan secara bulanan berdasar hari kehadiran (dengan pro rata basis).
8. Perusahaan yang telah memberikan upah diatas upah minimum tidak diperbolehkan menurunkan upah.
9. Dengan kenaikan upah minimum, pekerja diwajibkan untuk memelihara prestasi kerja (produktivitas) yang ukurannya dirumuskan bersama antara pekerja dan pengusaha.
10. Pengusaha yang tidak mampu menerapkan kebijakan upah minimum untuk pekerja diijinkan untuk melakukan penangguhan sementara kepada pemerintah atau pejabat yang ditunjuk.

Upah Minimum Kabupaten adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya pada suatu Kabupaten/Kota pada suatu tahun tertentu (Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989).

#### 2.1.5. Pengaruh Kebutuhan Hidup Layak terhadap UMK

Sebelum tahun 1985, upah minimum telah dihitung berdasarkan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), perubahan dari KFM Menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.81/1985. Dengan demikian besarnya Upah Minimum tidak lagi ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah melakukan berbagai kajian khususnya mengenai tingkat harga di daerah sebagai acuan utama untuk menetapkan Upah Minimum atas dasar kebutuhan hidup minimum. Perubahan pada jumlah dan kualitas barang jika KFM hanya terdiri dari 2600 kalori sedangkan KHM terdiri dari 3000 kalori untuk kelompok makanan dan minuman (Suryahadi, 2001).

Dewan Pengupahan Nasional mulai mengadakan pengkajian tentang Kebutuhan Fisik minimum yang hasilnya adanya perubahan dari kebutuhan Fisik Minimum menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang didalam KHM ini telah ditambah dengan kebutuhan akan pendidikan, rekreasi yaitu kebutuhan jasa. Menurut Dirjen Pengupahan dan jaminan Sosial mempunyai kelebihan dibandingkan dengan kebutuhan fisik minimum, kelebihan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu komoditi dari Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) untuk menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Jika dilihat dari Jumlah komoditi maka terjadi penurunan dari 48 item dalam KFM menjadi 43 item dalam KHM;
2. Kelompok pangan (makanan dan Minuman) telah meningkat dari 2600 kalori sehari menjadi 3000 kalori untuk pria/wanita pekerja lajang.
3. Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) Secara kuantitatif, KHM lebih tinggi sekitar 20 % apabila dibandingkan dengan KFM

Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 pasal 2 ayat (3) angka 9 huruf c, menyebutkan kebutuhan fisik minimum tetapi dalam prakteknya ditafsirkan sebagai kebutuhan hidup minimum (KHM) atau bahkan kebutuhan hidup layak (KHL). Penentuan upah minimum pada suatu daerah terdapat beberapa hal yang patut dikaitkan dengan UUD 45 terutama dalam usaha untuk mendapatkan pekerjaan atau penghidupan yang layak. Penggunaan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam komponen dalam penentuan upah minimum sejak tahun 2005 merupakan sinyal yang baik dalam peningkatan kesejahteraan pekerja, terutama setelah sebelumnya hanya menggunakan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). KHM memiliki 43 komponen dengan menggunakan standart kualitas sedang, untuk dapat hidup dan bekerja dengan sehat, adalah 3000 kalori. Sedangkan KHL memiliki 46 komponen dengan menggunakan standart kualitas sedang, untuk dapat hidup dan bekerja dengan sehat, adalah 3000 kalori. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan dari KHM menjadi KHL tidak jauh berbeda, hanya ditambah 3 komponen saja.

Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Dewan Pengupahan Provinsi /Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit, dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan bertugas memberikan saran serta pertimbangan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam penetapan upah minimum (Peraturan Menteri no. 17 th 2005 pasal 1). Kebutuhan Hidup layak sebagai dasar dalam penetapan upah minimum merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum. Kebutuhan hidup layak sebagai dasar dapat dikategorikan sebagai bahan pertimbangan utama, jika terjadi kenaikan terhadap KHL maka akan diikuti dengan kenaikan UMK Jember. (Peraturan Menteri no. 17 th 2005).

Standar KHL terdiri dari beberapa komponen yaitu :

1. Makanan & Minuman (11 items)
2. Sandang (9 items)
3. Perumahan (19 items)
4. Pendidikan (1 item)
5. Kesehatan (3 items)
6. Transportasi (1 item)
7. Rekreasi dan Tabungan (2 item)

#### 2.1.6. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap UMK

Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto PDB adalah nilai dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi dalam negeri dalam satu periode waktu tertentu. Output dari masing-masing barang dan jasa dinilai berdasarkan harga pasarnya dan nilai-nilai itu dijumlahkan sebagai nilai dari GDP (Dornbusch dan Fischer, 1997).

Sukirno (2004) menjelaskan bahwa PDRB adalah merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu, PDRB

merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan PAD di daerah tersebut. Penelitian data PDB yang digunakan berdasarkan wilayah regional kabupaten/kota yang biasanya disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada semua sektor industri karena penelitian ini menganalisis mengenai upah minimum kabupaten. Dalam penetapan upah minimum pihak Pemerintah dan Dewan Pengupahan akan tetap mempertimbangkan faktor lain yaitu PDRB dalam proses penetapan upah minimum kabupaten (Pratomo dan Saputra, 2011). Apabila terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja yang diukur dengan output PDRB maka upah minimum selanjutnya ditingkatkan (Gaol, 2006).

Peningkatan output PDRB merupakan sebuah pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah. Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono 1999). Sehingga persentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan terus berlanjut. Beberapa pakar ekonomi membedakan pengertian antara pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Para pakar ekonomi yang membedakan kedua pengertian tersebut mengartikan istilah pembangunan ekonomi sebagai :

1. Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat yaitu tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Nasional Bruto (PNB) pada suatu tahun tertentu dibagi dengan tingkat pertumbuhan penduduk.
2. Perkembangan PDB/PNB yang terjadi dalam suatu negara dibarengi oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB/PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perluasan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999).

### 2.1.7. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap UMK

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus Sukirno (2002). Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono,2000). Kenaikan harga-harga barang itu tidaklah harus dengan persentase yang sama. Inflasi didefinisikan dengan banyak ragam yang berbeda, tetapi semua definisi itu mencakup pokok-pokok yang sama. Samuelson (2001) memberikan definisi bahwa inflasi sebagai suatu keadaan dimana terjadi kenaikan t tingkat harga umum, baik barang-barang, jasa-jasa maupun faktor-faktor produksi. Definisi tersebut mengindikasikan keadaan melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara.

Definisi yang ada tentang inflasi dapatlah ditarik tiga pokok yang terkandung di dalamnya (Gunawan, 1991) yaitu :

1. Adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti mungkin saja tingkat harga yang terjadi pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan yang meningkat.
2. Peningkatan harga tersebut berlangsung terus menerus, bukan terjadi pada suatu waktu saja.
3. Mencakup tingkat harga umum (*general level of prices*) yang berarti tingkat harga yang meningkat itu bukan hanya pada satu atau beberapa komoditi saja.

Menurut Rahardja dan Manurung (2004) suatu perekonomian dikatakan telah mengalami inflasi jika tiga karakteristik berikut dipenuhi, yaitu : 1) terjadi kenaikan harga, 2) kenaikan harga bersifat umum, dan 3) berlangsung terus-menerus. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu perekonomian sedang dilanda inflasi atau tidak. Indikator tersebut diantaranya :

### 1. Indeks Harga Konsumen (IHK)

IHK adalah indeks harga yang paling umum dipakai sebagai indikator inflasi. IHK mempresentasikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu.

### 2. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

IHPB merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditi-komoditi yang diperdagangkan pada tingkat produsen di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Jika pada IHK yang diamati adalah barang-barang akhir yang dikonsumsi masyarakat, pada IHPB yang diamati adalah barang-barang mentah dan barang-barang setengah jadi yang merupakan input bagi produsen.

### 3. GDP Deflator

Prinsip dasar GDP deflator adalah membandingkan antara tingkat pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan riil.

Menurut Pratomo dan Adi Saputra (2011) mengemukakan dalam menentukan tingkat upah minimum tingkat inflasi atau indeks harga konsumen merupakan komponen dalam mempertimbangkan penetapan upah minimum kabupaten. Diterbitkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 01 tahun 1999 tentang Upah Minimum menyatakan bahwa didalamnya terdapat perubahan tingkat upah minimum pemerintah dengan melihat inflasi atau indeks harga konsumen sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan upah minimum. Simanjuntak (1996), kenaikan upah berhubungan dengan inflasi. Pada tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi), pengusaha cenderung meningkatkan upah untuk merekrut pekerja terbaik. Sebagai kompensasi, harga output harus ditingkatkan. Peningkatan harga output berarti laju inflasi meningkat. Laju inflasi yang tinggi mengakibatkan nilai riil upah merosot merugikan masyarakat penerima upah.

## 2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Erna Agustiana (2007) menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel PDRB, jumlah penduduk, kebutuhan hidup minimum dan dummy krisis berpengaruh terhadap penetapan upah minimum provinsi sebesar 55,55 persen dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Uji-t untuk variabel PDRB dan dummy krisis berpengaruh secara negatif dan nyata terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP). Sedangkan variabel kebutuhan hidup minimum dan jumlah penduduk berpengaruh secara positif dan nyata terhadap UMP.

Safrida (1999) dengan model ekonometrikanya menyimpulkan bahwa pengaruh peningkatan upah minimum terhadap penawaran dan permintaan tenaga kerja sektor pertanian berpengaruh nyata, sedangkan terhadap permintaan tenaga kerja sektor industri pengaruhnya kecil dan tidak berpengaruh nyata. Melihat keadaan ini, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan penetapan upah minimum sektor pertanian dan jasa dibandingkan peningkatan upah minimum sektor industri. Respon permintaan tenaga kerja pada masing-masing sektor terhadap upah minimum lebih baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Respon permintaan yang paling rendah adalah permintaan tenaga kerja sektor industri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model makro ekonomi tenaga kerja dalam bentuk persamaan simultan. Model tersebut terdiri dari tiga kelompok besar yaitu: laju inflasi, permintaan agregat dan penawaran. Kelompok permintaan agregat terdiri dari persamaan pendapatan nasional, pendapatan disposibel, investasi asing, investasi dalam negeri, total investasi, konsumsi rumah tangga, tabungan swasta dan pajak. Sedangkan kelompok penawaran agregat terdiri atas penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Hasil simultan yang dilakukan dari model tersebut menyimpulkan bahwa adanya peningkatan pengeluaran pemerintah atau peningkatan ekspor impor akan meningkatkan seluruh variabel permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Sandra (2004) dengan model 2 SLS (*two stage Least Square*) menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja memiliki tingkat signifikansi kurang dari 15 persen yang berarti bahwa parameter-parameternya kurang berpengaruh terhadap permintaan

dan penawaran tenaga kerja. Tetapi, model upah riil memiliki variabel-variabel yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkat upah riil, seperti upah minimum provinsi (UMP), inflasi dan tingkat upah sebelumnya. UMP yang ditetapkan oleh pemerintah ternyata memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat upah riil pekerja di Pulau Jawa.

Jurnal yang berjudul “Penetapan Upah Minimum Kabupaten / Kota Yang Kondusif” Musriha (2010). Secara nasional kondisi Indonesia apabila dibandingkan dengan negara lain kurang kondusif hal ini disebabkan antara lain : ketidakstabilan politik dan ekonomi, kurangnya jaminan keamanan, tidak ada kepastian hukum, buruh sering demo, order dan pemasaran sepi, banyak pungutan liar, pajak terlalu berbelit, tidak ada *industrial policy*. Tulisan tersebut tidak menggunakan suatu model ekonometrika yang menganalisis pengaruh variabel-variabel dari tingkat upah minimum tetapi menganalisis kebijakan upah minimum dari sisi teori.

Tabel 2.1. Konsep Penelitian Sebelumnya

Penelitian	Judul	Variabel	Metode	Hasil
Erna Agustiana (2007) Institut Pertanian Bogor (Skripsi)	Analisis Penentuan Upah Minimum Di Provinsi Jawa Barat	PDRB, jumlah penduduk, kebutuhan hidup minimum, dummy krisis dan upah minimum	<i>Two Stage Least Square</i>	PDRB, jumlah penduduk, kebutuhan hidup minimum dan dummy krisis berpengaruh secara signifikan terhadap upah minimum provinsi
Safrida (1999) Institut Pertanian Bogor (Tesis)	Dampak Kebijakan Upah Minimum Dan Makroekonomi Terhadap Laju Inflasi, Kesempatan Kerja Serta Keragaan Permintaan Dan Penawaran Agregat	Upah minimum, inflasi, kesempatan kerja, permintaan agregat dan penawaran agregat	<i>Two Stage Least Square</i>	Pengaruh peningkatan upah minimum terhadap penawaran dan permintaan tenaga kerja sektor pertanian berpengaruh nyata, sedangkan terhadap permintaan tenaga kerja industri pengaruhnya kecil dan tidak berpengaruh nyata.
Sandra (2004) Institut Pertanian Bogor (Skripsi)	Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Tingkat Upah dan Pengangguran di Pulau Jawa	Permintaan dan penawaran tenaga kerja, upah minimum provinsi, upah riil, pengangguran, inflasi	<i>Two Stage Least Square</i>	Variabel-variabel seperti upah minimum provinsi (UMP), inflasi dan tingkat upah sebelumnya. UMP yang ditetapkan oleh pemerintah ternyata memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat upah riil pekerja di Pulau Jawa
Wayan Gede Supartha (2006) PIRAMIDA Vol. II No. 2 : 69 – 77 Desember 2006 (Jurnal)	Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) di Provinsi Bali	Kebutuhan hidup Layak (KHL), produktivitas tenaga kerja (PDRB), pertumbuhan ekonomi, kemampuan perusahaan marginal, pasar tenaga kerja	<i>Analisis Deskriptif</i>	Secara umum terjadi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di Bali tercermin dari kenaikan UMP/UMK dalam 2 tahun terakhir. Indikator dasar pertimbangan KHL, pertumbuhan ekonomi, pasar tenaga kerja, kemampuan perusahaan marginal.

Adapun perbedaan yang terjadi antara hasil penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya yang dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial variabel inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap upah minimum. Sedangkan dalam penelitian yang sekarang ini menunjukkan variabel Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap upah minimum. Bahwa secara parsial variabel inflasi berpengaruh terhadap upah.

Persamaan yang terjadi antara hasil penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa secara parsial variabel kebutuhan hidup layak dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh terhadap penetapan upah minimum.

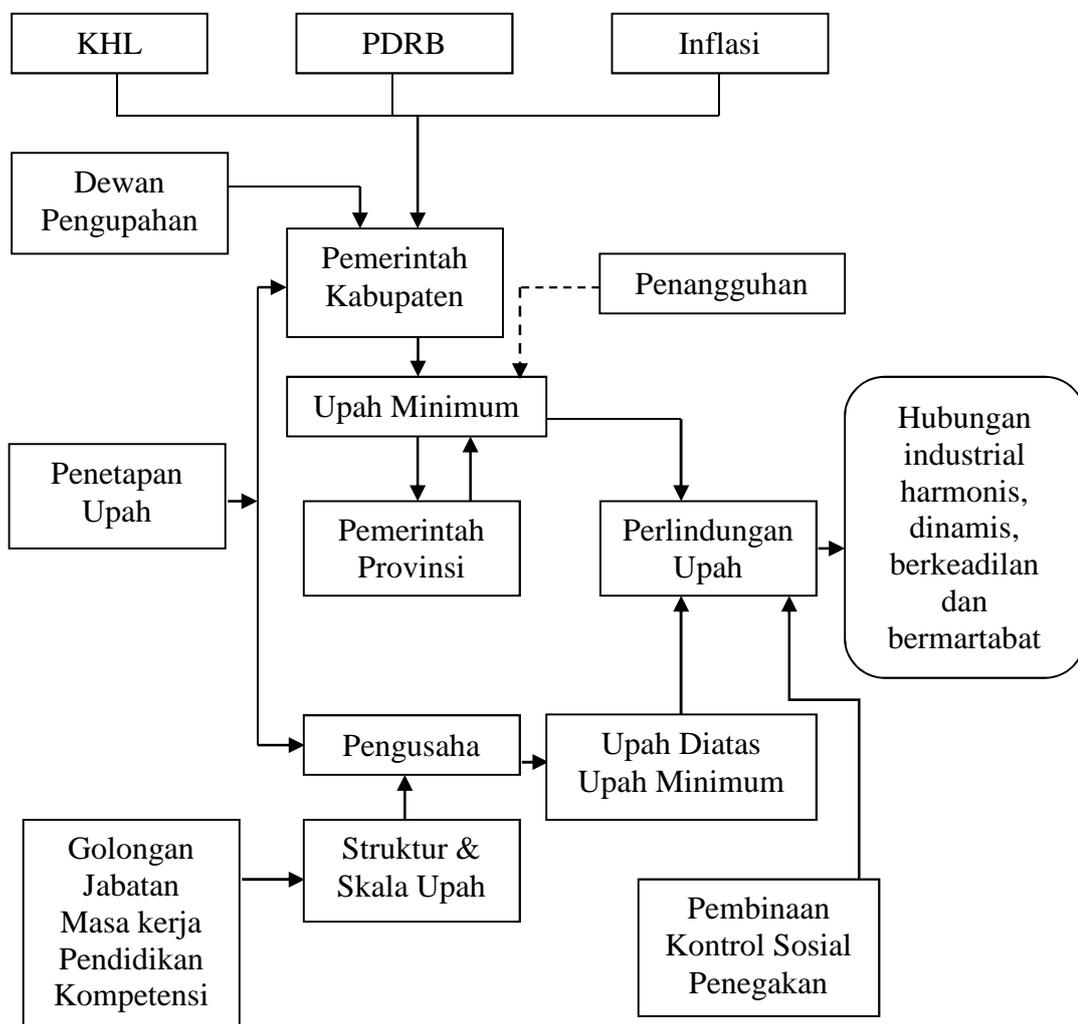
### **2.3 Kerangka Konseptual**

Penetapan upah minimum yang berhak melakukan kebijakan adalah pemerintah daerah Kab/Kota Jember atas persetujuan resmi dari pemerintah provinsi. Proses sebelum penetapan pemerintah akan mempertimbangkan komponen-komponen seperti Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat inflasi yang berfungsi sebagai pengaruh dalam proses penetapan upah minimum kabupaten. Pemerintah daerah Kab/Kota Jember juga menerima usulan dari Dewan Pengupahan yang bersifat independen yang terdiri dari tripartit, yaitu: pakar praktisi, wakil serikat buruh dan wakil Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan penetapan upah minimum provinsi (UMP) maka dalam daerah kabupaten/kota akan mematuhi peraturan tersebut. Dan daerah kabupaten/kota jika mengeluarkan kebijakan sendiri dalam penetapan upah minimum kabupaten (UMK), maka UMK harus lebih tinggi dari UMP yang akan di sahkan oleh Gubernur. Para pengusaha juga harus mematuhi kebijakan pemerintah tersebut dengan memberikan upah di atas upah minimum pada buruh. Jika ada perusahaan yang tidak mampu dalam penetapan upah minimum yang memberatkan para pengusaha, maka perusahaan tersebut bisa mengajukan penangguhan pada pemerintah. Adanya penangguhan maka petugas dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi akan turun untuk melakukan pemeriksaan mengenai

keberadaan perusahaan tersebut. Jika menurut pengamatan perusahaan penolak mampu akan dikenai sanksi, dan sebaliknya jika pailit wakil dari Disnakertrans akan mempertemukan antara perusahaan dan pekerja untuk saling memahami.

Apabila proses penetapan upah minimum ini sudah berjalan lancar dan tidak ada penanguhan, maka pemerintah berharap adanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat di antara semua pihak yang terkait.



Gambar. 2.1 Kerangka Konseptual

## **2.4 Hipotesis**

Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

1. Kebutuhan hidup layak berpengaruh terhadap penentuan upah minimum kabupaten Jember secara parsial
2. Produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap penentuan upah minimum kabupaten Jember secara parsial.
3. Tingkat inflasi berpengaruh terhadap penentuan upah minimum kabupaten Jember secara parsial.

## **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan diuraikan pada bab 3 ini merupakan metode dalam untuk mengestimasi variabel melalui data yang diperoleh. Metode yang berisi tentang rancangan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, uji statistik dan uji asumsi klasik.

### **3.1 Rancangan Penelitian**

#### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian menggunakan metode *explanatory*. Metode ini menjelaskan secara sistematis faktual dan akurat mengenai suatu objek yang diteliti. Tujuan dari metode ini adalah untuk mencari ada tidaknya pola hubungan dan sifat hubungan dua variabel atau lebih serta untuk menguji hipotesis bahkan menemukan teori baru (Nasir, 1998:45).

#### **3.1.2. Unit Analisis**

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah upah minimum kabupaten Jember tahun 1990-2012.

#### **3.1.3. Jenis dan sumber data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terbentuk dalam runtun waktu (*time series*). Data yang digunakan meliputi: Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat inflasi dari tahun 1990-2011 di Jember, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung namun dengan cara menyalin data yang telah ada dan berkaitan dengan penelitian

ini yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

### 3.3 Metode Analisis Data

#### 3.3.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan karena dalam penelitian ini mencakup lebih dari dua variabel (termasuk variabel terikat Y), dimana dalam regresi linier berganda variabel terikat Y tergantung pada dua atau lebih variabel bebas. Model regresi yang digunakan sebagai berikut (Gujarati, 2010):

Berikut adalah persamaan umum model regresi linier berganda :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + e_t$$

Penelitian ini sesuai dengan variabel-variabel yang digunakan dalam model persamaan regresi berganda pada judul Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten Jember. Mencermati judul tersebut maka penelitian tersebut menggunakan data *time series* dan jenis data tahunan. Model persamaannya adalah sebagai berikut :

$$UMK_t = \beta_0 + \beta_1 KHL_{1t} + \beta_2 PDRB_{2t} + \beta_3 INF_{3t} + e_t$$

dimana:

$UMK_t$  = Upah Minimum Kabupaten Jember periode t,

$\beta_0$  = Besarnya  $KHL_{1t}$ ,  $PDRB_{2t}$ ,  $INF_{3t}$  sama dengan nol (konstanta),

$\beta_1$  = Besarnya pengaruh kebutuhan hidup layak terhadap UMK,

$\beta_2$  = Besarnya pengaruh produk domestik regional bruto terhadap UMK,

$\beta_3$  = Besarnya pengaruh tingkat inflasi terhadap UMK,

$KHL_{1t}$  = kebutuhan hidup layak Jember periode t,

$PDRB_{2t}$  = produk domestik regional bruto Jember periode t,

$INF_{3t}$  = tingkat inflasi Jember periode t,

$e_t$  = variable pengganggu

### 3.3.2. Uji statistik

Uji statistik dilakukan untuk mengetahui besarnya masing-masing koefisien dari variabel-variabel bebas baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap variabel terikat yaitu dengan menggunakan uji secara serentak (uji-F), uji parsial (uji-t) dan koefisien determinasi berganda ( $R^2$ ).

#### 1. Pengujian Secara Bersama-sama (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh kebutuhan hidup layak (KHL), produk domestik regional bruto (PDRB) dan tingkat inflasi secara bersama-sama terhadap upah minimum kabupaten (UMK).

$$F_{\text{hitung}} = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Di mana:

$R^2$  : Koefisien determinan berganda

k : Jumlah variabel bebas

n : jumlah sampel

Dalam pengujian ini telah dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 = b_1 = b_2 = b_3 = b_4$ , Berarti seluruh variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap UMK

$H_1 = b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq 0$ , Berarti seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap UMK

Kriteria pengujian :

- a. Jika probabilitas F hitung  $< (0.05)$ , di mana  $\alpha$  merupakan besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan keputusan maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
- b. Jika probabilitas F hitung  $> (0.05)$ , di mana  $\alpha$  merupakan besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan keputusan maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

#### 2. Pengujian secara parsial (uji-t)

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa model uji-t ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

$$T \text{ hitung} = \frac{b}{s_b}$$

di mana:

$b$  = koefisien variabel bebas

$s_b$  = standart deviasi

Untuk mengetahui signifikansi dari masing-masing variabel telah ditetapkan hipotesis sebagai berikut:

a. Hipotesis Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

$H_0 = b_1 = 0$ , artinya variabel KHL tidak berpengaruh signifikan terhadap UMK

$H_1 = b_1 \neq 0$ , artinya variabel KHL berpengaruh signifikan terhadap UMK

b. Hipotesis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

$H_0 = b_2 = 0$ , artinya variabel produk domestik regional bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap UMK

$H_1 = b_2 \neq 0$ , artinya variabel produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap UMK

c. Hipotesis Tingkat inflasi

$H_0 = b_3 = 0$ , artinya tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap UMK

$H_1 = b_3 \neq 0$ , artinya tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap UMK

Kriteria pengambilan keputusan:

- 1) Jika probabilitas  $t$  hitung  $< (0.05)$ , di mana  $t$  merupakan besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan keputusan maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
- 2) Jika probabilitas  $t$  hitung  $> (0.05)$ , di mana  $t$  merupakan besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan keputusan maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

a. Koefisien Determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*)

Untuk mengukur total variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh seluruh variabel bebas. Rumus koefisien determinasi berganda ( $R^2$ ) yaitu :

$$adjusted R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

Keterangan :

$adjusted R^2$  = koefisien determinan

ESS = jumlah kuadrat yang dijelaskan

TSS = jumlah kuadrat total

Kriteria pengujian :

1. Apabila nilai  $adjusted R^2$  mendekati satu maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah positif, artinya apabila ada kenaikan dalam variabel bebas akan menyebabkan kenaikan pada variabel terikat;
2. Apabila nilai  $adjusted R^2$  mendekati nol maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah lemah atau tidak ada hubungan, artinya apabila ada kenaikan atau penurunan pada variabel bebas tidak akan menyebabkan kenaikan pada variabel terikat;
3. Apabila nilai  $adjusted R^2$  mendekati minus maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sempurna dan negatif, artinya apabila ada kenaikan variabel bebas akan menyebabkan penurunan pada variabel terikat.

### 3.3.3. Uji Asumsi Klasik

Agar tercapai suatu estimasi koefisien regresi yang diperoleh dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (*Ordinal Least Square Estimator*) merupakan estimasi linier tak bias *BLUE* (*Best Linier Unbiased Estimators*) maka dalam uji ini merupakan uji ekonometrika yang meliputi uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji normalitas dan uji linieritas (Wardhono, 2004).

#### 1. Uji Multikolinieritas

Untuk mengetahui adanya korelasi linier antar variabel bebas dalam model empiris. Multikolinieritas memberikan dampak yaitu estimator masih bersifat *BLUE* karena nilai varian dan ovarian besar, nilai t-hitung variabel bebas ada yang tidak signifikan karena interval estimasi cenderung lebih besar sehingga terdapat

kesalahan pengujian hipotesis, dan nilai koefisien determinasi  $R^2$  cenderung mempunyai nilai besar namun banyak variabel bebas yang tidak signifikan (Gujarati, 2003).

Pengujian untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan deteksi Klein yang dilakukan dengan melakukan regresi suatu variabel bebas dengan variabel bebas lain. *Rule of thumb*, dengan membandingkan nilai  $R^2$  model dengan nilai  $R^2$  regresi auxiliary. Bila nilai  $R^2$  regresi auxiliary nilai  $R^2$  model, maka model mengandung gejala multikolinieritas.

## 2. Uji Heteroskedastisitas

Terjadi apabila variabel pengganggu mempunyai varian yang tidak konstan atau berubah-ubah. Heteroskedastisitas cenderung menyerang model empiris yang menggunakan data cross section dari pada data time series. Hal ini terjadi karena perilaku data time series fluktuasinya dari waktu ke waktu relatif stabil. Konsekuensinya adanya gejala heteroskedastisitas adalah estimator tidak lagi mempunyai varian yang minimum yang berakibat perhitungan standar error metode OLS tidak bisa dipercaya lagi kebenarannya, uji-t dan uji-F tidak bisa dipercaya lagi untuk uji model regresi (Gujarati, 2003).

Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji White. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji White, sebagai berikut: Nilai probabilitas  $X^2$  hitung < nilai probabilitas kritis (0.05), maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas ditolak. Nilai probabilitas  $X^2$  hitung > nilai probabilitas kritis (0.05), maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas diterima.

## 3. Uji Autokorelasi

Suatu bentuk korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Masalah autokorelasi biasanya muncul dalam data *time series* meskipun tidak menutup kemungkinan juga pada data *cross section*. Pengujian disini dapat dilakukan dengan uji *Breusch-Godfrey Serial*

*Correlation* LM. Uji BG-LM digunakan untuk mengidentifikasi masalah autokorelasi tidak hanya pada first order tetapi bisa juga digunakan pada order lainnya (Gujarati, 2003).

Kriteria pengujian:

- a. Apabila nilai probabilitas  $x^2$  hitung  $<$  nilai probabilitas ( $= 5\%$ ), maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi ditolak.
- b. Apabila nilai probabilitas  $x^2$  hitung  $>$  nilai probabilitas ( $= 5\%$ ), maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi diterima.

#### 4. Uji Normalitas

Uji yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah nilai variabel pengganggu dari model yang dibentuk sudah normal atau tidak. Konsep pengujian uji normalitas menggunakan pendekatan Jarque-Berra test. Pedoman dari J-B test adalah: Apabila nilai probabilitas J-B hitung  $<$  nilai probabilitas ( $0.05$ ), maka hipotesis yang menyatakan bahwa variabel pengganggu adalah berdistribusi normal ditolak. Apabila nilai probabilitas J-B hitung  $>$  nilai probabilitas ( $0.05$ ), maka hipotesis yang menyatakan bahwa variabel pengganggu adalah berdistribusi normal diterima (Gujarati, 2003).

#### 5. Uji Linieritas

Uji yang dilakukan untuk mendeteksi bentuk model empiris yang kita gunakan sudah benar atau tidak dan menguji apakah suatu variabel baru relevan atau tidak dimasukkan dalam model empiris. Uji linieritas dapat menggunakan Ramsey Reset test dengan hipotesis sebagai berikut; Nilai probabilitas F-hitung  $>$  nilai probabilitas kritis ( $0.05$ ), maka model empiris yang digunakan mempunyai bentuk fungsi linier. Nilai probabilitas F-hitung  $<$  nilai probabilitas kritis ( $0.05$ ), maka model empiris yang digunakan tidak mempunyai bentuk fungsi linier (Gujarati, 2003).

### 3.4 Definisi Variabel Operasional dan Pengukurannya

Definisi operasional dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upah Minimum Kabupaten merupakan suatu standar upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember yang harus dipatuhi oleh

para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai atau buruh lajang dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun termasuk pekerja yang masih dalam masa percobaan didalam lingkungan usaha kerja dalam bentuk rupiah pada tahun  $t$  (Rp/bulan).

2. Kebutuhan hidup layak merupakan standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang pria/wanita untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan yang dinyatakan dalam harga satuan rupiah pada tahun  $t$  (Rp/bulan).
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan hasil atau output barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor kegiatan ekonomi di Kabupaten Jember atas dasar harga konstan tahun 2000 (Rp/tahun).
4. Inflasi adalah suatu keadaan ekonomi yang memperlihatkan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung terus menerus yang dapat dinyatakan dalam bentuk (persen/tahun).

## **BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan pembahasan merupakan laporan yang sudah dilakukan dalam penelitian terhadap objek yang diteliti yaitu perkembangan upah minimum Kabupaten Jember dengan hasil penelitian yang sudah di olah dengan alat analisis Eviews 6.1. Penelitian ini akan disajikan dengan analisis regresi linier berganda.

### **4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian**

Kabupaten Jember memiliki luas 3.293,34 Km<sup>2</sup> yang terletak pada posisi 6° 27' 9" s/d 7° 14' 33" Bujur Timur dan 7° 59' 6" s/d 8° 33' 56" Lintang Selatan. Wilayah yang terbentuk daratan yang subur pada bagian tengah dari selatan. Wilayah Kabupaten Jember dikelilingi pegunungan memanjang sepanjang batas utara dan timur Samudra Indonesia. Sebelah selatan terdapat pulau Nusa Barong yang merupakan batas paling selatan dan satu-satunya pulau yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Batas administrative Kabupaten Jember di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan sebagian kecil Kabupaten Probolinggo. Sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuwangi, disebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dan disebelah baat dibatasi oleh Kabupaten Lumajang. Dengan demikian secara umum wilayah Kota Jember didominasi oleh daerah daratan. Sedangkan luas keseluruhan dari Kota Jember adalah 9.907,755 Ha, yang terdiri dari 3 kecamatan dan 22 kelurahan. Batas-batas Kota Jember adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Arjasa
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Jenggawah
3. Sebelah Timur : Kecamatan Pakusari.
4. Sebelah Barat : Kecamatan Sukorambi.

Secara umum Kota Jember mempunyai kemiringan yang bervariasi, yakni berkisar antara 0-40%. Rincian kemiringan tersebut adalah :

1. 0-8% seluas 6493,355 Ha
2. 8-15% seluas 2742,53 Ha.
3. 15-25% seluas 330,08 Ha

4. 25-40% seluas 177,74 Ha.

5. >40% seluas 164,05 Ha.

Dataran wilayah Kota Jember banyak dibentuk oleh jenis tanah *litosol* dan *regosol* coklat kekuningan. Kondisi ini sangat menentukan tingkat kesuburan dan kedalaman efektif tanah, dimana tingkat kesuburan tersebut adalah berkisar di atas 90 cm.

## **4.2 Gambaran Umum Variabel Penelitian**

### **4.2.1 Upah Minimum Kabupaten**

Sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa penetapan upah minimum dapat dipastikan akan lebih besar atau setidaknya sama dengan upah minimum tahun sebelumnya. Kecenderungan ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam kaitannya dengan pemenuhan atas penetapan upah minimum. Pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menegaskan bahwa gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK). Ketetapan UMP ditetapkan selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum, sedangkan ketetapan upah minimum Kabupaten/Kota ditetapkan selambat-lambatnya 40 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum. Untuk meninjau terhadap besarnya UMP dan UMK diadakan satu tahun sekali.

Berdasarkan data yang sudah dilansir bahwasannya perkembangan upah minimum kabupaten jember selalu meningkat tiap tahun. Ini dikarenakan nilai kebutuhan hidup layak dan pertumbuhan ekonomi di jember juga meningkat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jember sebagai dari pihak pemerintah akan mengajak Dewan Pengupahan Nasional sebagai lembaga independen dalam mempertimbangkan penetapan upah minimum tahun yang akan datang. Dewan Pengupahan terdiri dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebagai wakil dari pengusaha, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) sebagai penyalur aspirasi pekerja dan Pakar Praktisi dari Perguruan Tinggi yang bertugas memberikan masukan kepada pemerintah. Semua pihak yang berwenang

bertugas mengevaluasi tingkat upah minimum kabupaten jember yang berlaku pada saat tertentu dan memutuskan apakah tingkat upah tersebut sudah saatnya dinaikkan atau belum.

Berdasarkan data yang dilansir dari Disnakertrans Upah Minimum Kabupaten UMK Jember pada tahun 2012 sudah cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya seperti Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo. Hingga saat batas penangguhan, dari sekitar 600 perusahaan belum ada yang mengajukan permohonan keberatan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jember. Tapi seandainya ada pengusaha mengajukan penangguhan pemberlakuan UMK 2012, nantinya dinas akan turun ke lapangan untuk melihat dari dekat kondisi sebenarnya dari perusahaan itu. Pada tahun 2012 ini juga tidak ada unsur demonstrasi dari pihak buruh terhadap UMK Jember, ini dimungkinkan karena upah minimum kabupaten jember sudah melampaui kebutuhan hidup layak bagi pihak buruh.

UMK di Jember tahun 2013 mencapai angka Rp 1.091.950 dan kebutuhan hidup layak (KHL) sudah terlampaui 100%. Pengusaha, pemerintah daerah, dan buruh perlu melakukan pertemuan hingga 12 kali untuk menentukan. Namun akhirnya terjadi kesepakatan. Pengusaha sendiri hanya mengharapkan adanya peningkatan kinerja dan produktivitas tenaga kerja. Dan juga ada dugaan tren rendahnya inflasi di Jember membuat penentuan UMK di Jember relatif tanpa pergolakan. Unsur inflasi masuk dalam perhitungan UMK. Tidak ada alasan lagi pengusaha tak memenuhi UMK dengan tingkat inflasi yang rendah di Jember dibandingkan daerah lain di Jatim, tingkat konsumsi yang tinggi dan perekonomian begitu stabil di Jember. Tahun 2012 inflasi Jember sekitar 4,3 persen plus minus satu persen. Stabilitas inflasi di Jember bukan faktor utama tidak bergolaknya penentuan UMK di Jember. Penentuan UMK tak terlampaui besar karena Jember bukan kota industri besar melainkan kota pertanian. Jumlah buruh relatif kecil dan indikator paling sederhana sebagian besar mereka yang naik haji dibiayai sektor pertanian. Indikasi basis pertanian kuat dan pertanian tidak memikirkan upah, yang penting pemerintah menjamin produksi lancar.

Upah minimum kabupaten adalah suatu ketetapan dari pemerintah daerah dalam penentuan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang diberlakukan di daerah kabupaten Jember. Untuk lebih jelasnya data dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1. Data dan Perkembangan UMK di Jember (1990-2011)

Tahun	UMK	Perkembangan UMK (%)
1990	42270	73.30
1991	42270	0
1992	66000	56.13
1993	66000	0
1994	88500	34.09
1995	103000	16.38
1996	108000	4.85
1997	127500	18.05
1998	146500	14.90
1999	174000	18.77
2000	212000	21.84
2001	275000	29.72
2002	315500	14.73
2003	384000	21.71
2004	397606	3.54
2005	425000	6.89
2006	525000	23.53
2007	575000	9.52
2008	645000	12.17
2009	770000	19.38
2010	830000	7.79
2011	875000	5.42

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jember

Perkembangan UMK di Jember pada umumnya mengalami kenaikan setiap tahun. Kenaikan ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Jember yang salah satunya dapat dilihat dari perkembangan PDRB yang cenderung mengalami kenaikan. Selama kurun waktu tahun 1990-2000 terlihat bahwa perkembangan kenaikan UMK yang terbesar terjadi pada tahun 1990 dan 1992, yaitu mencapai 73.30 % dan 56,13%. Ini dimungkinkan karena pada tahun sebelumnya tidak ada kenaikan upah minimum (konstan), jadi pada tahun selanjutnya ada kenaikan yg

signifikan cukup besar yang diikuti pada tahun selanjutnya yang tidak ada kenaikan. Pada tahun 1991 dan 1993 tidak ada kenaikan UMK ini dikarenakan Pemerintah dan Dewan Pengupahan memprediksi kenaikan kebutuhan hidup minimum pekerja buruh untuk 2 tahun kedepan. Jadi Pemerintah dan Dewan Pengupahan juga memprediksikan UMK yang cukup besar untuk masa 2 tahun kedepan.

Pada kurun waktu tahun 2000-2011 perkembangan kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2001 yang mencapai 29.72%. Ini dimungkinkan pada tahun tersebut sudah masuk dalam era demokrasi yang memperbolehkan pihak buruh untuk berdemonstrasi demi mencapai haknya untuk mendapat upah yang layak dan dapat hidup sejahtera. Dengan ada tekanan dari pihak buruh maka Pemerintah dan Dewan Pengupahan membuat kebijakan dalam upah minimum yang bisa jadi dinaikkan dengan melihat kenaikan kebutuhan hidup minimum/kebutuhan hidup layak, PDRB, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pada tahun 2003-2004 terjadi penurunan perkembangan UMK yang cukup besar atau kenaikan UMK yang cukup rendah dengan hanya 3.54%. Ini dikarenakan produktivitas tenaga kerja pada tahun tersebut masih tergolong rendah, ini dibuktikan dengan kenaikan output PDRB yang masih rendah sedangkan input tenaga kerja yang semakin meningkat.

#### 4.2.2 Kebutuhan Hidup Layak

Peraturan mengenai KHL, diatur dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pembahasan lebih dalam mengenai ketentuan KHL, diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Kebutuhan hidup layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Sejak diluncurkannya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan Upah Minimum seperti yang diatur dalam pasal 88 ayat 4. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini :

Tabel 4.2. Data dan Perkembangan KHL di Jember (1990-2011)

Tahun	KHL	Persentase %
1990	42433	7.02
1991	51030	20.26
1992	77020	40.13
1993	82423	7.01
1994	89425	8.49
1995	101000	12.94
1996	110285	9.19
1997	134554	22.01
1998	172466	28.18
1999	242547	40.63
2000	262264	8.13
2001	290000	10.57
2002	355577	22.61
2003	410000	15.31
2004	450300	9.83
2005	494549	9.82
2006	567834	14.81
2007	600000	5.66
2008	720000	20.00
2009	800000	11.11
2010	850000	6.25
2011	900000	5.88

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jember

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa kenaikan kebutuhan hidup layak terbesar terjadi pada tahun 1999 dengan persentase kenaikan 40.63%. Ini bisa diprediksikan bahwa pada tahun tersebut masih terkena dampak dari krisis moneter dan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 yang telah menyebar ke seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa. Dengan adanya krisis ekonomi maka kebutuhan barang dan jasa masyarakat dan pekerja buruh semakin meningkat, ini bisa dilihat pada tahun 1997-1999 terjadi kenaikan persentase yang cukup besar 22.2%, 28.18% dan 40.63%. Pada tahun 2011 persentase kenaikan akan KHL hanya 5.88%, cenderung rendah bila dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain. Kenaikan yang rendah pada tahun 2011 ini bisa dilihat karena indeks harga

konsumen pada tahun tersebut juga rendah. Dengan rendahnya indeks harga konsumen maka kenaikan akan KHL juga ikut rendah.

#### 4.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk domestik regional bruto merupakan nilai output dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu dengan memperhatikan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan PAD dan upah minimum di daerah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 4.3. Data dan Perkembangan PDRB di Jember (1990-2011)

Tahun	PDRB harga konstan 2000	Pertumbuhan Ekonomi %
1990	186050.38	5.07
1991	457427.93	5.05
1992	422385.87	4.06
1993	431442.41	6.68
1994	563275.46	5.33
1995	732997.72	4.80
1996	976540.14	6.57
1997	1253674.17	5.52
1998	2827207.53	1.23
1999	3120769.36	2.89
2000	6673652.7	5.47
2001	6899333.4	3.38
2002	7171205.2	3.94
2003	7457963.79	3.99
2004	7803930.92	4.64
2005	8195596.11	5.02
2006	9182213.66	5.70
2007	9731471.34	5.98
2008	10319002.73	6.04
2009	10891607.2	5.55
2010	11550549.44	6.05
2011	12358978.61	6.99

Sumber : Badan Pusat Statistik Jember

Tabel 4.3 menunjukkan pada tahun antara tahun 1992 sampai dengan bulan Juli 1999 kenaikan output PDRB cukup signifikan besarnya. Ini diakibatkan dari penambahan hutang luar negeri Indonesia dari Bank Dunia berasal dari pinjaman swasta yang membuat produksi semakin meningkat. Adanya penambahan arus modal dari pinjaman luar negeri ini maka tingkat output produksi di semua sektor akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan antara 1992-1999. Kenaikan output PDRB pada tahun 2000-2011 menunjukkan pada tahun tersebut Kabupaten Jember sudah mengalami peningkatan stabil meskipun peningkatannya masih rendah. Peningkatan tersebut dengan adanya tambahan investasi setiap tahun maka output produksi PDRB meningkat tiap tahun. Pihak pemerintah berpengaruh besar dalam hal ini, karena pihak pemerintah Kab. Jember dapat menarik investor asing untuk berinvestasi di semua sektor ekonomi di daerah Kab. Jember.

#### 4.2.4 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga-harga umum pada barang dan jasa yang terjadi secara terus menerus pada periode tertentu. Yang dipakai dalam penelitian ini adalah inflasi yang indikatornya indeks harga konsumen (IHK). IHK adalah indeks harga yang paling umum dipakai sebagai indikator inflasi. IHK mempresentasikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu. Pemerintah Kabupaten Jember selalu berusaha dapat menekan inflasi pada harga yang terjangkau untuk masyarakat di kalangan Jember. Untuk lebih jelasnya berikut data yang diperoleh dari instansi terkait sebagai berikut:

Tabel 4.5. Data Inflasi di Jember (1990-2011)

Tahun	Inflasi %
1990	5.23
1991	6.78
1992	5.12
1993	6.25
1994	5.45
1995	5.04
1996	6.17
1997	8.38
1998	84.95
1999	3.16
2000	10.35
2001	13.92
2002	9.79
2003	5.2
2004	6.24
2005	16.86
2006	6.84
2007	7.25
2008	10.63
2009	3.39
2010	7.09
2011	2.43

Sumber : BPS Jember

Pada tabel 4.5 menunjukkan pada tahun 1998 terjadi hyperinflasi (inflasi pada level yang tinggi). Banyak alasan pada tahun tersebut terjadi inflasi yang cukup tinggi, namun faktor utamanya adalah karena terjadi krisis politik. Pada tahun tersebut krisis ekonomi bercampur dengan krisis politik luar biasa pada zaman Presiden Soeharto sehingga terjadi kekacauan besar yang mengakibatkan pemilik modal dan investasi kabur dari Indonesia. Karena itu, rupiah menjadi merosot drastis diukur dengan dolar Amerika Serikat yang merupakan pusat ekonomi dunia. Pada tahun 2011 inflasi cukup rendah sebesar 2.43%, ini bisa dikarenakan kebijakan pemerintah yang dapat mengendalikan inflasi dengan bantuan subsidi pada barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya harga

kebutuhan pokok hanya naik dengan persentase yang dapat terjangkau oleh masyarakat luas.

### 4.3 Analisis Data

#### 4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran umum mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai rata-rata (mean) menunjukkan nilai kisaran data yang diperoleh dari penjumlahan seluruh data yang dibagi dengan jumlah data. Nilai median menunjukkan nilai tengah dari seluruh nilai data yang ada pada suatu variabel. Nilai maksimum menunjukkan nilai tertinggi dari suatu variabel, sedangkan nilai minimum menunjukkan nilai terendah dari suatu variabel. Nilai standar deviasi menunjukkan kisaran nilai rata-ratanya dimana semakin kecil nilai standar deviasi menunjukkan kisaran nilai data dalam penelitian ini semakin mendekati nilai rata-ratanya, sedangkan semakin besar nilai standar deviasi menunjukkan kisaran data yang tersebar menjauhi nilai rata-ratanya. Penyajian statistik deskriptif ditunjukkan dengan data *time series* pada periode tahun 1990-2011 ini dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Statistik data

	UMK	KHL	PDRB	INF
Mean	326961.2	357259.4	2312395	10.75091
Median	243500.0	287632.0	7493220.	6.515000
Maximum	875000.0	900000.0	12358978	84.95000
Minimum	42270.00	48433.00	186050.4	2.430000
Std. Dev.	270316.1	279213.9	3397727	16.92091
Observations	22	22	22	22

Sumber : Lampiran B, diolah

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diuraikan deskripsi dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

#### 1. Kebutuhan hidup layak (KHL)

Variabel KHL dalam penelitian ini berperan sebagai variabel bebas. KHL merupakan nilai kebutuhan hidup seorang buruh lajang dalam sebulan, dimana dalam penelitian ini memiliki nilai mean 357123.0 dengan nilai median 287632.0

serta standar deviasi 279369.7, nilai maksimum 900000.0 dan nilai minimum 48433.00. Dengan nilai standar deviasi  $<$  mean ( $279369.7 < 357123.0$ ), maka data dalam keadaan tersebar dengan baik.

## 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Variabel PDRB dalam penelitian ini berperan sebagai variabel bebas. PDRB merupakan nilai output produksi dari seluruh kegiatan ekonomi yang terbit setiap tahunnya, dimana dalam penelitian memiliki nilai mean 2312395 dengan nilai median 7493220 serta standar deviasi 33977277, nilai maksimum 119783557 dan nilai minimum 186050.4 Dengan nilai standar deviasi  $>$  mean ( $3397727 > 2312395$ ), maka data dalam keadaan tersebar dengan tidak baik.

## 3. Inflasi (INF)

Variabel INF dalam penelitian ini berperan sebagai variabel bebas. Inflasi merupakan indeks harga konsumen yang dapat dilihat dari kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dalam periode tertentu, dimana dalam penelitian ini memiliki nilai mean 10.75091 dengan nilai median 6.515000 serta standar deviasi 16.92091, nilai maksimum 84.95000 dan nilai minimum 2.430000. Dengan nilai standar deviasi  $>$  mean ( $16.92091 > 10.75091$ ), maka data dalam keadaan tersebar dengan tidak baik.

## 4. Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Variabel UMK dalam penelitian ini berperan sebagai variabel terikat. UMK merupakan standar upah minimum yang harus dipatuhi oleh para pengusaha untuk memberikan upah pada pegawainya atau buruh lajang, dimana dalam penelitian ini memiliki nilai mean 326961.2 dengan nilai median 243500.0 serta standar deviasi 270316.1, nilai maksimum 875000 dan nilai minimum 42270.00. Dengan nilai standar deviasi  $<$  mean ( $270316.1 < 326961.2$ ), maka data dalam keadaan tersebar dengan baik.

#### 4.3.2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil regresi dalam penelitian ini untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel kebutuhan hidup layak (KHL), PDRB dan inflasi terhadap upah minimum kabupaten Jember. Hasil penelitian empiris ini di peroleh dari analisis Regresi Linier Berganda. Berikut ini merupakan hasil estimasi dengan data sekunder pada tahun 1990-2011 (n=22) dan 4 variabel bebas dan 1 variabel terikat yang di olah dengan software Eviews 6.1.

Hasil estimasi regresi untuk mengetahui besarnya koefisien regresi dari variabel KHL, PDRB, pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap upah minimum kabupaten Jember baik secara serentak maupun secara parsial, dengan pengambilan keputusan adalah perbandingan antara nilai probabilitas (*p-value*) dan *level of significant* = 1% (0,05). Berikut merupakan hasil estimasi dari persamaan regresi linier berganda yang dapat dilihat pada Table 4.3.

Tabel 4.3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: UMK				
Method: Least Squares				
Date: 06/10/13 Time: 21:18				
Sample: 1990 2011				
Included observations: 22				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3340.921	7831.375	0.426607	0.6747
KHL	0.851960	0.034004	25.05500	0.0000
PDRB	0.000981	0.000281	3.488943	0.0026
INF	-309.2951	216.2541	-1.430240	0.1698
R-squared	0.996809	F-statistic		1874.180
Adjusted R-squared	0.996277	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber: Lampiran C, diolah

Berdasarkan Tabel 4.3 maka dapat rumus persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini, sebagai berikut :

$$UMK = 3340.92059186 + 0.851960223367 * KHL + 0.00098126984351 * PDRB - 309.29514467 * INF$$

Dari persamaan di atas dapat di jelaskan :

- a. Nilai konstanta sebesar 3340.92059186 menunjukkan bahwa pada saat variabel KHL, PDRB dan inflasi bernilai nol atau konstan, maka upah minimum kabupaten mampu menetapkan UMK sebesar 3340.92059186 Rp/tahun
- b. Koefisien regresi variabel KHL sebesar 0.851960223367 yang berarti bahwa setiap kenaikan Rp 1000 /bulan KHL, maka akan menaikkan upah minimum kabupaten sebesar 851,960223367 Rp/bulan.
- c. Koefisien regresi variabel PDRB sebesar 0.00098126984351 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1000 Rp/tahun PDRB, maka akan menaikkan upah minimum kabupaten sebesar 0.98126984351 Rp/tahun.
- d. Koefisien regresi variabel inflasi (INF) sebesar - 309.29514467 yang berarti bahwa setiap kenaikan 100 %/tahun INF, maka akan menurunkan upah minimum kabupaten sebesar – 309295.14467 %/tahun.

#### 4.3.3 Hasil Uji Statistik

##### 1. Uji Secara Serempak (Uji-f)

Untuk menguji pengaruh secara serempak dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan uji F. Hasil analisis tabel 4.3 nilai probabilitas F-hitung ( $0.000000$ ) < ( $= 0.05$ ), berarti seluruh variabel KHL, PDRB, dan inflasi signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat upah minimum Kabupaten Jember.

##### Uji Secara Parsial (Uji-t)

Berdasarkan hasil estimasi regresi linier berganda pada Tabel 4.3 maka dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel KHL, PDRB dan inflasi terhadap upah minimum Kabupaten Jember.

##### a. Kebutuhan hidup layak (KHL)

Hasil estimasi menunjukkan bahwa p-value adalah sebesar 0.0000 Dengan demikian, p-value  $0.0000 < = 0.05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berdasarkan hasil estimasi tersebut, diketahui bahwa KHL berpengaruh signifikan terhadap upah minimum Kabupaten Jember.

b. Produk domestik regional bruto (PDRB)

Hasil estimasi menunjukkan bahwa p-value adalah sebesar 0.0026. Dengan demikian,  $p\text{-value } 0.0026 < = 0.05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berdasarkan hasil estimasi tersebut, diketahui bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap upah minimum Kabupaten Jember.

c. Inflasi (INF)

Hasil estimasi menunjukkan bahwa p-value adalah sebesar 0.1698. Dengan demikian,  $p\text{-value } 0.1698 > = 0.05$  sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Berdasarkan hasil estimasi tersebut, diketahui bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap upah minimum Kabupaten Jember.

2. Adjusted R-squared

Dari hasil analisis di atas nilai adjusted R-squared sebesar 0.996133, artinya total variasi variabel terikat UMK mampu dijelaskan oleh variabel bebas KHL, PDRB, pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebesar 99.61% sedangkan sisanya sebesar 0.39% dijelaskan variabel lain di luar model.

#### 4.3.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi tersebut ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Gejala multikolinieritas dapat dideteksi dengan menggunakan deteksi klein.

Tabel 4.6 Hasil uji deteksi klein

Jenis regresi	R-squared auxiliary
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai variabel terikat	0.995332
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel terikat	0.901267
Inflasi (INF) sebagai variabel terikat	0.013556

Sumber: Lampiran D, diolah

Berdasarkan Tabel di atas diketahui nilai R-squares auxiliary dari masing-masing variabel bebas yang diestimasi tersebut menunjukkan nilai yang lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai adjusted R-square model 0.996277.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam model tidak terjadi multikolinieritas.

## 2. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah kesalahan pengganggu mempunyai varian yang sama dari masing-masing variabel bebas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi digunakan metode uji *white no cross terms*.

Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Obs*R-squared	1.778184	Prob. Chi-Square(4)	0.6197
Scaled explained SS	1.290742	Prob. Chi-Square(4)	0.7313

Sumber: Lampiran E, diolah

Berdasarkan tabel di atas diketahui probabilitas Chi-Square adalah 0.6197. Oleh karena probabilitas Chi-Square  $0.6197 > (0.05)$  maka dapat dikatakan dalam model tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 3. Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Breusch Godfrey*. Hasil estimasi terhadap uji autokorelasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Table 4.5.

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	1.113678	Prob. F(2,15)	0.3525
Obs*R-squared	2.688368	Prob. Chi-Square(2)	0.2608

Sumber: Lampiran F, diolah

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa probabilitas Chi-Square adalah 0.2608. Oleh karena probabilitas Chi-Square  $0.2608 > (0.05)$  maka dapat dikatakan bahwa dalam model empiris tidak terdapat permasalahan autokorelasi.

## 4. Uji Linieritas

Uji yang dilakukan untuk mendeteksi bentuk model empiris yang kita gunakan sudah benar atau tidak dan menguji apakah suatu variabel baru relevan atau tidak dimasukkan dalam model empiris. Uji linieritas dapat menggunakan Ramsey RESET test sebagai berikut:

Tabel 4.6 Uji Ramsey RESET test

F-statistic	0.580788	Prob. F(2,15)	0.5708
Log likelihood ratio	1.541853	Prob. Chi-Square(2)	0.4626

Sumber: Lampiran G, diolah

Berdasarkan tabel di atas nilai probabilitas F-hitung adalah sebesar 0.4626. Oleh karena nilai probabilitas F-hitung  $0.4626 > (0.05)$  maka model empiris yang digunakan mempunyai bentuk linier.

#### 5. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Berra LM. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas

Jarque-bera	2.247260
Probability	0.325098

Sumber: Lampiran H, diolah

Berdasarkan gambar di atas probabilitas Jarque-Berra adalah sebesar 0.325098. Oleh karena probabilitas Jarque-Berra  $> (0.05)$  maka dapat dikatakan bahwa variabel pengganggu berdistribusi normal.

#### 4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis linier berganda menunjukkan hasil penelitian ini secara serentak memiliki pengaruh terhadap upah minimum Kabupaten Jember (UMK). Artinya variabel kebutuhan hidup layak (KHL), produk domestik regional bruto (PDRB) dan inflasi (INF) terhadap upah minimum kabupaten (UMK) Jember tahun 1990-2011 baik secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel terikat di dalam model.

Hasil estimasi regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel kebutuhan hidup layak berpengaruh secara signifikan dan memiliki koefisien positif terhadap upah minimum Kabupaten Jember periode 1990-2011. Artinya dengan semakin meningkat kebutuhan hidup layak yang terjadi di kalangan buruh maka mengakibatkan nilai penetapan upah minimum Kabupaten Jember pada

tahun berikutnya semakin meningkat, begitu pula sebaliknya bila terjadi penurunan nilai kebutuhan hidup layak maka mengakibatkan turunnya nilai penetapan upah minimum Kabupaten Jember pada tahun berikutnya. Adanya hubungan positif kebutuhan hidup layak terhadap upah minimum Kabupaten Jember ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erna Agustina (2007) yang menyatakan bahwa kebutuhan hidup minimum atau yang sekarang sering disebut kebutuhan hidup layak berpengaruh positif terhadap upah minimum kabupaten. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan landasan teori yang ada yang menyatakan bahwa setiap pencapaian kenaikan nilai KHL diikuti dengan kenaikan penetapan UMK Jember (Peraturan Menteri no. 17 th 2005).

Hal ini bisa dilihat dari data variabel kebutuhan hidup layak tiap tahunnya yang mendekati nilai data upah minimum Kabupaten Jember, namun pertumbuhan nilai kebutuhan hidup layak tidak pernah melebihi nilai pertumbuhan upah minimum Kabupaten Jember. Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya pemerintah Kab. Jember belum bisa menuntaskan masalah atau keinginan buruh sampai sekarang, yaitu dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan tingkat penghasilan yang harus dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup layak. Jadi jika dalam peraturan pemerintah upah minimum sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak dalam penetapan upah minimum, namun secara kualitas tidak mengalami perubahan dan hal itu sama sekali tidak membawa perubahan terhadap peningkatan atau perbaikan kesejahteraan kaum buruh di berbagai daerah khususnya di Jember. Di sisi pemerintah juga mengalami kendala, jika penetapan upah minimum harus disamakan atau lebih tinggi dari kebutuhan hidup layak maka hal dipaksakan tersebut akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK), karena pengusaha sulit mendapatkan keuntungan jika upah tinggi namun produktifitas tenaga kerja buruh masih rendah. Supaya para pangusaha tidak merugi maka mereka akan melaksanakan PHK terhadap buruh.

Hasil estimasi regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh secara signifikan dan memiliki koefisien positif terhadap upah minimum Kabupten Jember periode 1990-2011.

Artinya dengan semakin meningkat variabel PDRB maka nilai penetapan UMK Jember pada tahun berikutnya juga semakin meningkat, begitu pula sebaliknya bila terjadi penurunan nilai PDRB maka mengakibatkan turunnya nilai penetapan UMK Jember pada tahun berikutnya. Adanya hubungan positif PDRB terhadap UMK bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erna Agustina (2007). Dalam penelitian Erna Agustina didapatkan hasil PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap UMK Jember. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Gaol (2006) yang menyatakan bahwa apabila terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja yang dapat dilihat dari output PDRB maka upah minimum selayaknya ditingkatkan.

Adanya pengaruh variabel PDRB terhadap upah minimum Kabupaten Jember menunjukkan produktivitas tenaga kerja buruh di daerah Jember termasuk cukup baik atau ada peningkatan tiap tahunnya. Adanya peningkatan produktivitas tenaga kerja buruh maka keuntungan para pengusaha juga akan meningkat. Para pengusaha tidak begitu khawatir dengan adanya kenaikan upah minimum kabupaten, karena dengan adanya kelebihan keuntungan dari hasil produksi yang meningkat maka para pengusaha akan sanggup membayar tanggungan upah buruh atau upah minimum Kabupaten Jember. Hal ini harus tetap bisa dipertahankan tiap tahunnya, agar terciptanya kesejahteraan buruh dan terjadinya hubungan yang harmonis antara pengusaha, buruh dan pemerintah. Dari sisi pemerintah dalam hal ini harus lebih teliti lagi dalam segi pengawasan terhadap para pengusaha yang tidak membayar upah sesuai dengan upah minimum Kabupaten Jember. Dari sisi pengusaha dalam hal ini harus lebih teliti lagi dalam hal rekrutmen tenaga kerja buruh yaitu dengan mempunyai skill dan pengalaman agar produktivitas tenaga buruh tetap meningkat tiap tahun.

Hasil analisis regresi linier berganda pada variabel inflasi menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap penetapan upah minimum Kabupaten Jember. Artinya, tinggi dan rendahnya tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap penetapan upah minimum kabupaten Jember. Hasil ini tidak sesuai dengan landasan teori Simanjuntak (1996), kenaikan upah berhubungan dengan inflasi. Pada tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi),

pengusaha cenderung meningkatkan upah untuk merekrut pekerja terbaik. Sebagai kompensasi, harga output harus ditingkatkan. Peningkatan harga output berarti laju inflasi meningkat. Laju inflasi yang tinggi mengakibatkan nilai riil upah merosot merugikan masyarakat penerima upah. Kecenderungan tidak adanya pengaruh signifikan variabel inflasi terhadap UMK Jember dipengaruhi oleh data inflasi di Kabupaten Jember tidak tersebar dengan baik atau berdasarkan data yang diperoleh masih terdapat inflasi yang cukup tinggi. Dengan ini pemerintah Kabupaten Jember harus bisa lebih menekan laju inflasi yang terjadi pada tahun yang akan datang.

## **BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian terdapat pengaruh kebutuhan hidup layak, produk domestik regional bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap penetapan upah minimum Kabupaten Jember. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini secara serentak memiliki pengaruh terhadap upah minimum Kabupaten Jember (UMK). Artinya variabel kebutuhan hidup layak (KHL), produk domestik regional bruto (PDRB) dan inflasi (INF) berpengaruh terhadap upah minimum kabupaten (UMK) Jember.
2. Variabel kebutuhan hidup layak (KHL) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.0000 dengan nilai koefisien sebesar 0.8521. Berarti variabel KHL berpengaruh signifikan dan positif terhadap upah minimum Kabupaten Jember. Berpengaruh signifikan karena variabel KHL merupakan variabel utama dalam perencanaan pemerintah dalam mempertimbangkan penetapan upah minimum Kabupaten Jember.
3. Variabel produk domestik regional bruto (PDRB) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.0026 dengan nilai koefisien sebesar 0.0009. Berarti variabel PDRB berpengaruh signifikan dan positif terhadap upah minimum Kabupaten Jember. Berpengaruh signifikan karena variabel PDRB juga merupakan tolak ukur dalam mempertimbangkan kenaikan upah minimum. Dengan pertumbuhan PDRB juga merupakan pertumbuhan ekonomi yang meningkat maka pendapatan perkapita juga akan meningkat. Maka dengan ini kenaikan upah minimum Kabupaten Jember akan terus berlanjut.
4. Variabel inflasi (INF) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.1698. Berarti variabel inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap upah minimum Kabupaten Jember. Tidak mempunyai pengaruh bisa dikarenakan fluktuasi lonjakan kenaikan/ penurunan inflasi sangat drastic dan tidak stabil. Maka dengan data tersebut variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan akan penetapan upah minimum Kabupaten Jember.

## 5.2 Saran

Saran yang diperoleh dari hasil penelitian pengaruh variabel kebutuhan hidup layak, PDRB, pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap upah minimum Kabupaten (UMK) Jember, adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah Kabupaten Jember sebaiknya lebih memperhitungkan dengan bijak berbagai faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan penetapan upah minimum Kabupaten Jember.
2. Untuk penelitian yang akan datang sebaiknya menganalisa lebih lanjut variabel-variabel yang lebih tepat untuk menghasilkan suatu dugaan yang tepat untuk memperbaiki teori yang telah ada.

## DAFTAR BACAAN

### BUKU

- Anton H. Gunawan, 1991. *Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Boediono, 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE
- Boediono. 2000. *Ekonomi Moneter*, edisi 3, BPFE: Yogyakarta
- Gall, G. (1998), "The Development of the Indonesian Labour Movement". *International Journal of Human Resources Management*, 9(2), 359-376.
- Gaol S. Lumban, 2006. *Aplikasi Faktor Pertimbangan Dalam Penetapan Upan Minimum*. Makalah dalam Forum Konsultasi dan Komunikasi Dewan Pengupahan, Wisma Karya Jasa, Bogor.
- Gujarati, D. (2003), *Basic Econometric*. McGraw-Hill, New York.
- Gujarati, D. N. 2010. **Dasar-dasar Ekonometrika Buku 1**. Edisi 5. Terjemahan,. Salemba Empat. Jakarta.
- Jhingan, M.L. 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, terjemahan D.Guritno. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Manning, C. (2003a), "*Labor Policy and Employment Creation: An Emerging Crisis?*". PEG-USAID, Technical Report, Jakarta, Indonesia.
- Manurung, Mandala, dan Pratama Rahardja. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*. Jakarta. Lembaga Penerbit FE UI
- Nachrowi, D dan Hardius, Usman. 2002. *Pendekatan Populer dan praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta : LPFEUI.
- Nasir, M. 1998. *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia
- Payaman J Simanjuntak, 2002, *Masalah Upah dan Jaminan sosial*, Lembaga Penerbit UI, Jakarta.

- Rama, M. (2001), "The Consequences of Doubling the Minimum Wage: The Case of Indonesia". *Industrial and Labor Relations Review*, 54(4), 864-881.
- Sadono, Sukirno. 2002, *Pengantar Teori Makroekonomi*, edisi kedua, Rajawali Pers, Jakarta
- Sukirno, Sadono. (2004). Makro Ekonomi. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Samuelson, Paul A. (2001). "*Micro Economics*", Mc Graw Hil, Perpustakaan FEB UIN Syarif hidayatullah Jakarta
- Simanjuntak, P. J. 1996. "*Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*". Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Simanjuntak, Payaman, J., 2002, "*Masalah Upah dan Jaminan sosial*", dalam Undang-Undang yang baru tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kantor Perburuhan Internasional: Jakarta.
- Sony Sumarsono, 2003, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sugiyarto, G. and B. A. Endrigna (2008) : "*Do Minimum Wages Reduce Employment and Training?*", Asian Development Bank Economics and Research Department Working Paper Series No. 113.
- Sumarsono, Sony (2003), *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan* , Graha Ilmu Yogyakarta.
- Suryahadi, A., Widyanti, W., Perwira, D., Sumarto, S. (2003), "*Minimum Wage Policy and Its Impact on Employment in the Urban Formal Sector*". Bulletin of Indonesian Economic Studies, 39(1), 29-50.
- Shasta Pratomo dan Adi Saputra, *Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian Yang Berkeadilan : Tinjauan Uud 1945*, dalam *Journal of Indonesian Applied Economics* Vol. 5 No. 2 Oktober 2011, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Tjiptoherijanto, P., 2000., *Urbanisasi dan Perkembangan Perkotaan di Indonesia*, Jakarta.

## JURNAL

- Musriha, 2010, *Penetapan Upah Minimum Kabupaten / Kota Yang Kondusif Di Jawa Timur*, dalam jurnal berkala ilmu ekonomi volume 4, No. 2, Desember 2010, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Tianggur Sinaga, *Kebijakan Pengupahan di Indonesia*, dalam Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 3 No. 2, Peneliti Madya Bidang Litbang, Edisi Juli – Desember 2008.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-05/Men/1989 Tentang Upah Minimum
- Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor Per – 01/Men/1999 *tentang upah minimum*
- Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor Per – 17/Men/VIII/2005 *tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 *tentang Ketenagakerjaan*
- UU No.13, tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Penerbit Karina, Surabaya

## INTERNET

- Kepala Disnakertrans Jember Achmad Hariadi dalam *KOMPAS. Com*, 13 Februari 2012  
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/02/13/19221984/Tak.Ditolak..Upah.Buruh.Rp.920.000.di.Jember>
- Kepala Disnakertrans Jember Achmad Hariadi dalam *Beritajatim. Com* , 17 Oktober 2012.  
[http://www.beritajatim.com/detailnews.php/1/Ekonomi/2012-10-17/149510/UMK\\_Jember\\_Rp\\_1,04\\_Juta\\_Tahun\\_2013](http://www.beritajatim.com/detailnews.php/1/Ekonomi/2012-10-17/149510/UMK_Jember_Rp_1,04_Juta_Tahun_2013)
- Pembina Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Eks Karesidenan Besuki dalam *Beritajatim.com*, sabtu, 29 Desember 2012 20:00:29.
- Deputi Bidang Moneter Bank Indonesia Jember Dwi Suslamanto dalam *Beritajatim.com*, sabtu, 29 Desember 2012 20:00:29.
- <file:///C:/Users/Ilham/Documents/File%20Pelatihan%20Metrik/Referensi%20Judul%20skripsi/gambaran%20jember%202013.html>

Lampiran A. Data mentah Upah Minimum Kabupaten, Kebutuhan Hidup Layak, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi tahun 1990-2011 di Kabupaten Jember

Tahun	Upah Minimum Kabupaten Jember (Rp/Bulan)	Kebutuhan hidup layak (Rp/bulan)	PDRB harga konstan 2000 (Rp/tahun)	Inflasi (%/tahun)
1990	42270	48433	186050.38	5.23
1991	42270	51030	457427.93	6.78
1992	66000	77020	422385.87	5.12
1993	66000	82423	431442.41	6.25
1994	88500	89425	563275.46	5.45
1995	103000	105000	732997.721	5.04
1996	108000	110285	976540.14	6.17
1997	127500	134554	1253674.17	8.38
1998	146500	192466	2827207.53	84.95
1999	174000	242547	3120769.36	3.16
2000	212000	262264	6673652.7	10.35
2001	275000	313000	6899333.4	13.92
2002	315500	355577	7171205.2	9.79
2003	384000	410000	7457963.79	5.2
2004	397606	450300	7803930.92	6.24
2005	425000	494549	8195596.11	16.86
2006	525000	567834	9182213.66	6.84
2007	575000	600000	9731471.34	7.25
2008	645000	720000	10319002.73	10.63
2009	770000	800000	10891607.2	3.39
2010	830000	850000	11550549.44	7.09
2011	875000	900000	12358978.61	2.43

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Badan Pusat Statistik periode 1990-2011

## Lampiran B. Hasil Analisis Deskriptif

	UMK	KHL	PDRB	INF
Mean	326961.2	357123.0	23123951	10.75091
Median	243500.0	287632.0	7493220.	6.515000
Maximum	875000.0	900000.0	1.20E+08	84.95000
Minimum	42270.00	48433.00	186050.4	2.430000
Std. Dev.	270316.1	279369.7	33977277	16.92091
Skewness	0.739027	0.609421	1.637851	4.084387
Kurtosis	2.263720	2.077025	4.586075	18.45702
Jarque-Bera	2.499520	2.142672	12.14203	280.1777
Probability	0.286574	0.342551	0.002309	0.000000
Sum	7193146.	7856707.	5.09E+08	236.5200
Sum Sq. Dev.	1.53E+12	1.64E+12	2.42E+16	6012.659
Observations	22	22	22	22

## Lampiran C. Hasil regresi linier berganda

Dependent Variable: UMK				
Method: Least Squares				
Date: 06/11/13 Time: 07:09				
Sample: 1990 2011				
Included observations: 22				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3340.921	7831.375	0.426607	0.6747
KHL	0.851960	0.034004	25.05500	0.0000
PDRB	0.000981	0.000281	3.488943	0.0026
INF	-309.2951	216.2541	-1.430240	0.1698
R-squared	0.996809	Mean dependent var		326961.2
Adjusted R-squared	0.996277	S.D. dependent var		270316.1
S.E. of regression	16493.82	Akaike info criterion		22.42232
Sum squared resid	4.90E+09	Schwarz criterion		22.62070
Log likelihood	-242.6456	Hannan-Quinn criter.		22.46906
F-statistic	1874.180	Durbin-Watson stat		1.951065
Prob(F-statistic)	0.000000			

## Lampiran D. Hasil uji multikolinieritas menggunakan deteksi klein

## Model Auxiliary 1

Dependent Variable: KHL				
Method: Least Squares				
Date: 06/11/13 Time: 07:11				
Sample: 1990 2011				
Included observations: 22				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1073.716	9105.352	0.117921	0.9074
UMK	1.141046	0.045542	25.05500	0.0000
PDRB	-0.000907	0.000363	-2.495996	0.0225
INF	366.0724	249.6144	1.466551	0.1598
R-squared	0.995999	Mean dependent var		357123.0
Adjusted R-squared	0.995332	S.D. dependent var		279369.7
S.E. of regression	19088.12	Akaike info criterion		22.71449
Sum squared resid	6.56E+09	Schwarz criterion		22.91286
Log likelihood	-245.8593	Hannan-Quinn criter.		22.76122
F-statistic	1493.445	Durbin-Watson stat		1.886341
Prob(F-statistic)	0.000000			

## Model Auxiliary 2

Dependent Variable: PDRB				
Method: Least Squares				
Date: 06/11/13 Time: 07:12				
Sample: 1990 2011				
Included observations: 22				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10736745	4421754.	-2.428164	0.0259
UMK	411.1354	117.8395	3.488943	0.0026
KHL	-283.6113	113.6265	-2.495996	0.0225
INF	66925.44	146874.1	0.455665	0.6541
R-squared	0.915372	Mean dependent var		23123951
Adjusted R-squared	0.901267	S.D. dependent var		33977277
S.E. of regression	10676267	Akaike info criterion		35.36791
Sum squared resid	2.05E+15	Schwarz criterion		35.56628
Log likelihood	-385.0470	Hannan-Quinn criter.		35.41464
F-statistic	64.89838	Durbin-Watson stat		1.001272
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lanjutan

## Model Auxiliary 3

Dependent Variable: INF				
Method: Least Squares				
Date: 06/11/13 Time: 07:12				
Sample: 1990 2011				
Included observations: 22				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.56137	7.738696	1.364749	0.1892
UMK	-0.000330	0.000231	-1.430240	0.1698
KHL	0.000292	0.000199	1.466551	0.1598
PDRB	1.70E-07	3.74E-07	0.455665	0.6541
R-squared	0.131237	Mean dependent var	10.75091	
Adjusted R-squared	-0.013556	S.D. dependent var	16.92091	
S.E. of regression	17.03521	Akaike info criterion	8.671408	
Sum squared resid	5223.573	Schwarz criterion	8.869779	
Log likelihood	-91.38549	Hannan-Quinn criter.	8.718138	
F-statistic	0.906375	Durbin-Watson stat	2.430108	
Prob(F-statistic)	0.457442			

## Lampiran E. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White				
F-statistic	0.527604	Prob. F(3,18)	0.6690	
Obs*R-squared	1.778184	Prob. Chi-Square(3)	0.6197	
Scaled explained SS	1.290742	Prob. Chi-Square(3)	0.7313	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 06/11/13 Time: 07:14				
Sample: 1990 2011				
Included observations: 22				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.60E+08	1.10E+08	1.462080	0.1610
KHL^2	0.000738	0.000681	1.083615	0.2928
PDRB^2	-4.69E-08	4.81E-08	-0.975439	0.3423
INF^2	-25809.78	50277.31	-0.513348	0.6140
R-squared	0.080827	Mean dependent var	2.23E+08	
Adjusted R-squared	-0.072369	S.D. dependent var	3.35E+08	
S.E. of regression	3.47E+08	Akaike info criterion	42.33297	
Sum squared resid	2.17E+18	Schwarz criterion	42.53134	
Log likelihood	-461.6627	Hannan-Quinn criter.	42.37970	
F-statistic	0.527604	Durbin-Watson stat	1.831756	
Prob(F-statistic)	0.668963			

## Lampiran F. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
F-statistic	1.113678	Prob. F(2,16)	0.3525	
Obs*R-squared	2.688368	Prob. Chi-Square(2)	0.2608	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID				
Method: Least Squares				
Date: 06/11/13 Time: 07:14				
Sample: 1990 2011				
Included observations: 22				
Presample missing value lagged residuals set to zero.				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	175.6750	7788.847	0.022555	0.9823
KHL	-0.005568	0.034436	-0.161692	0.8736
PDRB	5.49E-05	0.000289	0.190147	0.8516
INF	46.96960	220.0006	0.213498	0.8336
RESID(-1)	0.010932	0.246252	0.044395	0.9651
RESID(-2)	-0.368684	0.247146	-1.491766	0.1552
R-squared	0.122199	Mean dependent var	-5.95E-12	
Adjusted R-squared	-0.152114	S.D. dependent var	15270.31	
S.E. of regression	16390.63	Akaike info criterion	22.47381	
Sum squared resid	4.30E+09	Schwarz criterion	22.77137	
Log likelihood	-241.2119	Hannan-Quinn criter.	22.54390	
F-statistic	0.445471	Durbin-Watson stat	1.882738	
Prob(F-statistic)	0.810340			

## Lampiran G. Hasil Uji Linieritas

Ramsey RESET Test:				
F-statistic	0.580788	Prob. F(2,16)	0.5708	
Log likelihood ratio	1.541853	Prob. Chi-Square(2)	0.4626	
Test Equation:				
Dependent Variable: UMK				
Method: Least Squares				
Date: 06/11/13 Time: 07:15				
Sample: 1990 2011				
Included observations: 22				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11267.32	12295.42	0.916383	0.3731
KHL	0.749198	0.129941	5.765684	0.0000
PDRB	-0.000459	0.002557	-0.179653	0.8597
INF	-216.3192	238.5678	-0.906741	0.3780
FITTED^2	4.39E-07	4.21E-07	1.042298	0.3128
FITTED^3	-1.41E-13	4.14E-13	-0.339709	0.7385
R-squared	0.997025	Mean dependent var	326961.2	
Adjusted R-squared	0.996095	S.D. dependent var	270316.1	
S.E. of regression	16891.91	Akaike info criterion	22.53406	
Sum squared resid	4.57E+09	Schwarz criterion	22.83162	
Log likelihood	-241.8746	Hannan-Quinn criter.	22.60415	
F-statistic	1072.362	Durbin-Watson stat	1.985924	
Prob(F-statistic)	0.000000			

## Lampiran H. Hasil Uji Normalitas

